

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM KONSERVASI WILAYAH PESISIR
YANG BERKELANJUTAN**

**(Studi Perda No.35 Tahun 2003 Tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di
Muncar, Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

FANDI ADITYA FIANDA

NIM. 105030100111074



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2014

MOTTO

Jangan Hanya Bicara, Bertindaklah

Jangan Hanya Berjanji, Buktikanlah

Karena Setiap Usaha Keras Akan Memberikan Hasil



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi
Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan (Studi Perda No 35 Tahun 2003
tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi)

Disusun Oleh : Fandi Aditya Fianda

Nim : 105030100111074

Jurusan : Administrasi Publik

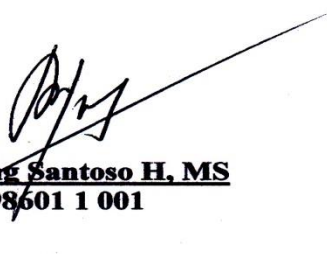
Konsentrasi : Administrasi Publik

Malang, 21 Mei 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Bambang Santoso H, MS
19610204 198601 1 001



Drs. Heru Ribawanto, MS
19520911 197903 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 12 Juni 2014
 Jam : 09.00 WIB
 Skripsi atas nama : Fandi Aditya Fianda
 Judu : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan (Studi Perda No. 35 Tahun 2003 Tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

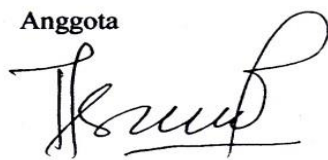

Dr. Bambang Santoso H, MS
 NIP. 19610204 198601 1 001


Drs. Heru Ribawanto, MS
 NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota

Anggota


Dr. Endah Setyowati, S. Sos, M.Si
 NIP. 19710505 199903 2 001


Trisnawati, S. Sos, M.AP
 NIP. 19800307 200801 2 012

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 21 Mei 2014



Fandi Aditya Fianda
105030100111074

RINGKASAN

Fandi Aditya Fianda, 2014, **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan (Studi Perda No 35 Tahun 2003 tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)**, Dr. Bambang Santoso H, MS, Drs. Heru Ribawanto, MS

Muncar merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang menjadi pusat industrialisasi terbesar setelah Bagan Siapi – api. Namun dengan berjalannya waktu kualitas ekosistem pesisir Muncar mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh 2 faktor yaitu faktor alam (global warming dan abrasi) serta faktor manusia (pencemaran, penggunaan alat atau bahan yang tidak ramah lingkungan, serta eksploitasi hasil perikanan secara berlebihan). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan merumuskan peraturan yaitu Perda No 35 Tahun 2003 tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar. Tujuan dari Perda No 35 Tahun 2003 tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking adalah diharapkan mampu mengembalikan ekosistem pesisir secara berkelanjutan agar kembali normal sehingga mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu mengenai model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (1978:1986) dalam Wahab, Abdul (2005:70-81). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Perda No 35 Tahun 2003 tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam implementasi Perda No 35 Tahun 2003. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data Miles dan Huberman.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: 1) implementasi Perda No 35 Tahun 2003 tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking masih belum berjalan secara optimal khususnya untuk meningkatkan hasil produksi perikanan 2) masih terkendala dari tingkat partisipasi dan pemahaman dari masyarakat serta kurangnya jumlah SDM dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi khususnya yang melaksanakan kegiatan konservasi kayu aking. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu mengevaluasi pelaksanaan implementasi Perda No 35 Tahun 2003 dengan mereduksi faktor penghambat yang dihadapi dan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung yang ada sebagai langkah perbaikan terhadap implementasi Perda No 35 Tahun 2003 tentang konservasi kayu aking kedepannya.

Kata Kunci: Konservasi, Wilayah Pesisir, Implementasi Perda

SUMMARY

Fandi Aditya Fianda, 2014. **The Implementation of Local Government Policy for Sustainable Coastal Conservation (Study of Local Regulation No. 35 of 2003 about Kayu Aking Conservation Region At Muncar Subdistrict, Banyuwangi District)**, Dr. Bambang Santoso H, MS, Drs. Heru Ribawanto, MS.

Muncar is one area that is in Banyuwangi at the center of the biggest industrialization after Bagan Siapi - api. But with the passage of time the quality of coastal ecosystems Muncar damage caused by 2 factors, natural factors (global warming and abrasion) and human factors (pollution, the use of tools or materials that are not environmentally friendly, and excessive exploitation of fishery products). For the Government of the District of Banyuwangi along with the Department of Marine and Fisheries formulate rules that Local Regulation No. 35 of 2003 about Kayu Aking Conservation Region in the District Muncar. The purpose of Local Regulation No. 35 of 2003 on Kayu Aking Conservation Region is expected to restore coastal ecosystems in a sustainable manner in order to get back to normal so as to provide benefits to the public welfare in the present and in the future..

The theory used in this research regarding policy implementation model developed by Hogwood and Gunn (1978: 1986) in Wahab, Abdul (2005: 70-81). This research aims to describe and analyze the implementation of Local Regulation No. 35 of 2003 about Kayu Aking Conservation Region as well as describing and analyzing the factors that support or become a barrier in the implementation of Local Regulation No. 35 of 2003. The method used is descriptive qualitative research using data analysis Miles and Huberman.

This research resulted in some of the conclusions are: 1) the implementation of Local Regulation No. 35 of 2003 about Kayu Aking Conservation Region is still not running optimally in particular to improve fisheries production 2) results are still constrained by the level of participation and understanding of society as well as the lack of a number of human resorces of the Department of marine and fisheries of Banyuwangi Regency in particular carry out conservation activities kayu aking. Therefore, the Marine and Fisheries Agency of Banyuwangi Regency is expected to evaluate the implementation of Local Regulation No. 35 of 2003 with the reduction factor inhibitor faced and optimize the supporting factors that exist as a step towards the implementation of improvements to Local Regulation No. 35 of 2003 about Kayu Aking Conservation Region future.

Keywords: Conservation, Coastal Region, Implementation of Local Regulation

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan (Studi Perda No 35 Tahun 2003 tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi.

Atas tersusunnya skripsi ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan tulus ikhlas. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku ketua Prodi Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Bambang Santoso H, MS dan Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu untuk bimbingan dan petunjuknya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ir. Pudjo Hartanto M.AP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan beserta pegawai – pegawai di bidang kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi atas waktu dan kemudahan yang diberikan dalam melakukan penelitian.
6. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga terima kasih atas doanya yang selalu mengalir, tuntunan, dukungan, serta usahanya yang diberikan.

7. Teman-teman kuliah dan kos yang selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Mei 2014

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah	13
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	13
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Daerah	14
B. Konsep Dasar Kebijakan Publik	17
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	17
2. Proses Kebijakan Publik	18
3. Implementasi Kebijakan Publik	20
4. Model Implementasi Kebijakan	21
C. Pembangunan Berkelanjutan.....	23

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan	23
D. Konservasi Wilayah Berkelanjutan.....	26
1. Pengertian Kawasan Konservasi Wilayah Berkelanjutan	26
2. Tujuan Kawasan Konservasi.....	28
E. Partisipasi Masyarakat	31
1. Pengertian Partisipasi.....	31
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi	34
3. Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	36
4. Tahap – Tahap Partisipasi	37
5. Manfaat Partisipasi.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian.....	42
C. Lokasi dan Situs Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Instrumen Penelitian.....	48
G. Analisis Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Kecamatan Muncar	52
a. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	52
b. Penduduk.....	55
c. Tenaga Kerja	56
d. Kondisi Ekosistem	57
2. Dinas Kelautan dan Perikanan	59
a. Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan	59
b. Visi dan Misi	61
c. Struktur Organisasi	63
d. Tugas Pokok Perbidang Dinas Kelautan dan Perikanan	64
e. Komposisi dan Jumlah Pegawai.....	78
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	81
1. Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 Tentang Konservasi Kayu Aking.....	81
a. Pelaksanaan Program Konservasi Terkait Sumber Daya Manusia dan Anggaran Daerah.....	95
b. Komunikasi dan Koordinasi Antar Stakeholder Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Program Konservasi	100
c. Peran Masing – Masing Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Konservasi	103

d. Hasil Capaian	109
2. Bentuk Kegiatan Dalam Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 Tentang Konservasi Kayu Aking.....	112
a. Kegiatan Dalam Proses Pelaksanaan Konservasi Kayu Aking	112
b. Kegiatan Dalam Proses Pengawasan Konservasi Kayu Aking.....	114
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Konservasi Kayu Aking	115
a. Faktor Pendukung	116
b. Faktor Penghambat.....	117
C. Analisis Data Penelitian	123
1. Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 Tentang Konservasi Kayu Aking	123
a. Pelaksanaan Program Konservasi Terkait Sumber Daya Manusia dan Anggaran Daerah	126
b. Komunikasi dan Koordinasi Antar Stakeholder Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Program Konservasi	128
c. Peran Masing – Masing Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Konservasi	131
d. Hasil Capaian	132
2. Bentuk Kegiatan Dalam Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 Tentang Konservasi Kayu Aking.....	135
a. Kegiatan Dalam Proses Pelaksanaan Konservasi Kayu Aking	135
b. Kegiatan Dalam Proses Pengawasan Konservasi Kayu Aking	136
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Konservasi Kayu Aking	138
a. Faktor Pendukung	138
b. Faktor Penghambat.....	139
BAB V PENUTUP	142
1. Kesimpulan	142
2. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Data Kawasan Konservasi di Indonesia	3
Tabel 2 Hasil Produksi Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2012	4
Tabel 3 Wilayah Administrasi Kecamatan Muncar	53
Tabel 4 Produksi Perikanan Muncar Per Jenis Komoditas Tahun 2011 – 2012	54
Tabel 5 Data Jumlah Tenaga Kerja Nelayan di Kec. Muncar Tahun 2008 – 2012 ..	56
Tabel 6 Potensi Perairan Kecamatan Muncar	83
Tabel 7 Identifikasi Permasalahan di Perairan Kec. Muncar	84
Tabel 8 Perkembangan Produksi Perikanan Kec. Muncar Tahun 2002 – 2012	92
Tabel 9 Daftar Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2012	97
Tabel 10 Rincian Dana Untuk Kegiatan Konservasi Kayu Aking Tahun 2013	99
Tabel 11 Peserta Pelatihan Ekosistem Terumbu Karang	112
Tabel 12 Pelanggaran di Kec. Muncar Tahun 2013	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Analisis Data Miles dan Huberman.....	50
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi	63
Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	79
Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	80
Gambar 5 Perkembangan Produksi Perikanan Muncar Tahun 2002 – 2012	94



LAMPIRAN

Hasil Dokumentasi Penelitian	153
Panduan Wawancara Penelitian	155
Surat Riset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi	156
Surat Riset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi	157
Curriculum Vitae	158



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara maritim yang hampir seluruh wilayahnya dikelilingi oleh laut dan samudra memiliki kekayaan laut yang sangat luar biasa. Luas Wilayah Indonesia tidak kurang dari 5,8 juta km² dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 13.487 pulau yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Kawasan pesisir di Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman jenis sumber daya alamnya baik sumber daya alam yang dapat pulih (*Renewable*) maupun yang tidak dapat pulih (*Un-renewable*). Sumber daya alam pesisir bila dipadukan dengan sumber daya manusia yang handal serta di dukung dengan iptek yang di tunjang dengan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat, bisa menjadi modal yang besar bagi pembangunan nasional (Anggoro, 2000).

Peluang yang dimiliki adalah kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang potensial untuk ditumbuhkembangkan pelayanggunaannya. Sumber daya alam pesisir mempunyai arti penting bagi kegiatan perikanan, konservasi dan preservasi lingkungan, wisata bahari dan kegiatan jasa lingkungan lain yang terkait. Tingginya nilai sumber daya alam dan nilai strategis itu menjadikan kawasan pesisir sangat memungkinkan untuk dikembangkannya berbagai kegiatan. Namun dengan

berjalannya waktu, kawasan pesisir mengalami permasalahan yaitu rusaknya kualitas dari sumber daya pesisir yang menyebabkan menurunnya kualitas serta kuantitas dari sumber daya perikanan akibat pola pikir masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan yang masih belum memahami mengenai pentingnya keberlanjutan yang berwawasan lingkungan. Untuk mencapai dan memperbaiki kualitas ekosistem pesisir, Indonesia melakukan kegiatan atau tindakan yang digunakan untuk proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, sekaligus pengendalian yaitu berupa kegiatan konservasi.

Konservasi yang berkelanjutan saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi kehidupan di masa depan agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki target untuk mengembangkan kawasan konservasi perairan (KKP) seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan menjadi dua kali lipat pada tahun 2020. Lebih lanjut didalam rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan dinyatakan bahwa untuk menuju 20 juta hektar, maka luasan kawasan konservasi perairan (KKP) pada tahun 2014 ditargetkan sudah mencapai 15,5 juta hektar, sehingga di dalam kurun waktu 6 tahun selanjutnya harus mengembangkan minimal 4,5 juta kawasan konservasi perairan (KKP) baru.

Tabel 1**Perkembangan Data Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia**

Tahun	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)
2003	733,00 hektar
2004	50.496,00 hektar
2005	1.417.889,53 hektar
2006	1.527.682,40 hektar
2007	3.512.019,66 hektar
2008	4.198.602,00 hektar
2009	8.868.634,31 hektar
2010	9.256.413,11 hektar

Sumber: <http://kkji.kp3k.kkp.go.id>

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2010, Indonesia telah mengembangkan 9.256.413,11 juta hektar atau hampir mencapai target yang ditetapkan Indonesia yaitu 10 juta hektar kawasan konservasi perairan (KKP) pada tahun 2010. Perkembangan luasan kawasan konservasi perairan (KKP) mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2003. Pada tahun 2003 luas kawasan konservasi perairan (KKP) baru mencapai luasan 733,00 juta hektar. Dan setiap tahun mulai 2003 hingga tahun 2010 luas kawasan konservasi perairan (KKP) mengalami peningkatan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan cukup besar adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memiliki luas perairan 208.138km². Di Jawa Timur terdapat salah satu kabupaten yang memiliki luas wilayah laut atau pesisir terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung paling timur Pulau Jawa yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di Timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat.

Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dengan luas 5.782,50 km². Kabupaten Banyuwangi mempunyai panjang garis pantai 175,8 km yang berada di 11 kecamatan yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan menghadap Samudera Indonesia, 7 (tujuh) kecamatan menghadap Selat Bali dan 1 (satu) kecamatan menghadap Laut Jawa. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang tersebut, dalam perspektif ke depan pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut (www.banyuwangikab.go.id). Hasil produksi perikanan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Hasil Produksi Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2012

NO.	KECAMATAN	2011		2012	
		Kg.	Rp.	Kg.	Rp.
1.	Muncar	38,328,994	326,883,033,400	28,313,788	251,867,997,375
2.	Pesanggaran	568,948	6,726,303,750	5,537,876	41,406,473,150
3.	Purwoharjo	967,635	9,106,014,450	3,037,649	17,305,113,000
4.	Wongsorejo	221,313	3,007,353,500	685,636	8,772,014,600
5.	Kalipuro	92,132	1,111,977,850	180,399	1,890,464,500
6.	Banyuwangi	38,563	466,676,850	1,628,961	17,819,487,630

7.	K a b a t	23,616	265,751,950	1,672,605	29,559,486,750
8.	Rogojampi	144,464	1,852,297,450	1,771,440	27,119,592,000
9.	Tegaldlimo	40,182	644,230,550	1,640,994	10,290,987,600
10.	Siliragung	0	0	0	0
11.	Bangorejo	0	0	0	0
J u m l a h		40,425,847	350,063,639,750	44,469,348	406,031,616,605

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2012

Salah satu kecamatan yang menjadi pusat pelabuhan dan industri dalam bidang perikanan di Banyuwangi adalah Muncar. Muncar merupakan pusat pelabuhan ikan terbesar di Indonesia kedua setelah Bagan Siapai-api di Sumatera Utara. Di Muncar hampir seluruh warganya yang berada di sepanjang garis pantai berprofesi sebagai nelayan dengan total 13.200 jiwa pada tahun 2012. Hasil tangkapan ikan di Muncar pada tahun 2012 mencapai 28.313.788 ton. Namun seiring berjalannya waktu, wilayah laut di Muncar mulai mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh 2 faktor yaitu faktor alam (pemanasan global) dan manusia (pencemaran, perusakan terumbu karang, dan eksploitasi hasil perikanan yang berlebih) sehingga menyebabkan hasil produksi tangkapan nelayan menurun (Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi, 2012). Salah satu faktor yang paling mempengaruhi dari rusaknya ekosistem pesisir di Muncar adalah banyaknya nelayan yang menggunakan bahan berbahaya seperti *potassium cyanida* dan alat tangkap berbahaya seperti pukat harimau yang dapat merusak dan menghancurkan terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biak ikan

sehingga berdampak terhadap menurunnya hasil produksi atau hasil tangkapan dari nelayan yang diakibatkan rusaknya terumbu karang.

Oleh karena itu, kawasan pesisir perlu mendapat perhatian yang intensif untuk mengurangi berbagai permasalahan yang timbul. Sehingga diperlukan adanya penyusunan kebijakan, strategi dan program penataan zonasi laut dan pesisir yang disesuaikan dengan karakteristik, daya dukung (*carrying capacity*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan daerah dan nasional, serta terpeliharanya integritas dan daya dukung lingkungan. Keberadaan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Lautan dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang didalamnya meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, memerlukan upaya yang sistematis dan terukur agar dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, selain dari Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Lautan dan Pulau-Pulau Kecil terdapat juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah mengamanatkan dan mengatur bagaimana semestinya konservasi dijalankan untuk menjamin ketersediaan sumberdaya ikan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengacu dari Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Lautan dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 35 Tahun 2003 tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking untuk menjaga kelangsungan ekosistem di wilayah pesisir Banyuwangi khususnya di Muncar sebagai pusat industri perikanan.

Melalui kegiatan konservasi kayu aking yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu memperbaiki dan melestarikan ekosistem pesisir di Muncar yang mengalami kerusakan akibat dari faktor alam maupun faktor dari manusia sehingga masih dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Namun didalam implementasi Perda No. 35 Tahun 2007 masih mengalami hambatan ataupun kendala seperti tingkat partisipasi dan pemahaman dari masyarakat mengenai konservasi kayu aking yang masih kecil serta kurangnya SDM yang menjalankan kegiatan konservasi kayu aking. Untuk melancarkan kegiatan konservasi yang dilakukan, perlu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi diperlukan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dalam menentukan dan mengidentifikasi potensi di kawasan pesisir maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi kayu aking yang merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab serta mampu menjadi inspirator, inisiator dan

dinamisator dalam menjaga kelestarian sumber daya secara berkelanjutan dalam konservasi kayu aking. Maka untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumber daya manusia yang baik serta tingkat partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi kayu aking tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan konservasi wilayah pesisir yang berkelanjutan serta faktor pendukung dan penghambat dalam implemetasi Perda. No 35 Tahun 2003. Apabila dalam pelaksanaan konservasi tersebut mampu dikelola dan dijalankan dengan baik maka akan mampu memperbaiki kualitas ekosistem laut yang ada di Banyuwangi khususnya Muncar sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan (Studi Perda No 35 Tahun 2003 tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang wilayah konservasi kayu aking yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi di Muncar?
2. Bagaimanakah bentuk kegiatan dalam implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang wilayah konservasi kayu aking?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang wilayah konservasi kayu aking?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah digunakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang konservasi kayu aking di Muncar, Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bentuk kegiatan dalam implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang wilayah konservasi kayu aking

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang wilayah konservasi kayu aking

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi instansi – instansi maupun LSM yang terkait didalam proses pelaksanaan konservasi wilayah pesisir di kawasan Muncar baik pada saat proses perumusan kebijakan maupun saat pelaksanaan kegiatan konservasi wilayah pesisir, agar nantinya dalam pelaksanaa koservasi wilayah pesisir di Muncar dapat berjalan dengan baik serta masing – masing stakeholder yang terkait didalam pelaksanaan kegiatan konservasi wilayah pesisir dapat saling berkoordinasi dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat Muncar khususnya, tentang pentingnya pelaksanaan kegiatan konservasi pesisir bagi peningkatan kualitas lingkungan, sehingga tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk bisa saling menjaga lingkungan pesisir di kawasan Muncar agar tidak terjadi kerusakan dan over eksploitasi terhadap

hasil laut sehingga bisa meningkatkan hasil pendapatan masyarakat Muncar yang berprofesi sebagai nelayan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan mengenai analisis kebijakan pemerintah daerah dalam konservasi wilayah pesisir yang berkelanjutan

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini mengemukakan secara garis besar teoritis yang meliputi teori partisipasi, teori pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, teori koordinasi, serta peran stakeholder dalam pelaksanaan konservasi wilayah pesisir yang berkelanjutan.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, focus penelitian yang mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Kemudian lokasi dan situs penelitian, tempat penelitian dilakukan, sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data yang menyangkut bagaimana penulis memperoleh data dan analisis data yang mengemukakan bagaimana penulis memerlukan data yang

diperoleh dengan mengelompokkan data sehingga siap dianalisis serta metode analisis yang digunakan, yakni menggunakan metode kualitatif.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menyajikan deskripsi wilayah penelitian dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data dan gambaran umum lokasi penelitian dan interpretasi data, serta pembahasan data.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang garis besarnya merupakan temuan pokok, baik bersifat substansial maupun metode teknis serta dikemukakan pula analisis dari hasil pembahasan, serta saran yang merupakan rekomendasi yang berisi tentang masukan dari peneliti yang bisa dipertimbangkan oleh pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan konservasi wilayah pesisir.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Ada beberapa pengertian tentang Pemerintah Daerah atau lokal yang dapat dirujuk dari beberapa pendapat berikut:

Josef Riwu Kaho dalam Jimung (2005:40) mendefinisikan pemerintah daerah (*local government*) adalah bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang – Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintah yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam kekuasaannya.

Elemen yang terkandung dalam rentang pengertian pemerintah lokal (*local government*) merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi dalam arti sempit (*devolusi*). Dalam hal ini pemerintah lokal (*local government*) dapat dimaknai menjadi tiga hal. Pertama, sebagai pemerintah daerah yang mengacu pada organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang di desentralisasi. Kedua, sebagai pemerintahan daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentralisasi. Ketiga, sebagai daerah otonom tempat dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri (Muluk, 2005:12)

Dengan adanya desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang terbaik bagi masyarakatnya serta diharapkan akan tercipta masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif/prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengartikan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai keseluruhan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.
- b. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

- c. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusannya, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
- d. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan, pemerintah daerah dapat:
 - 1) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
 - 2) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
 - 3) Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Kriteria eksternalitas adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - 2) Kriteria akuntabilitas adalah pertanggungjawaban penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya

dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

- 3) Kriteria Efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
 - 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
- f. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria tertentu atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- g. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara antara lain :
- 1) Perlindungan hak konstitusional
 - 2) Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan
 - 3) dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pemenuhan komitmen

nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensional internasional

- h. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

B. Konsep Dasar Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu aspek yang harus dikaji dalam ilmu administrasi publik. Dalam administrasi publik terdapat ragam istilah yang mengartikan kebijakan publik. Salah satunya adalah kebijakan publik yang diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum dan keadaan tertentu yang dikenhendaki. Istilah kebijakan ini dipakai untuk menunjukkan adanya pernyataan – pernyataan kehendak pemerintah mengenai tujuan – tujuan umum dari kegiatan – kegiatan yang diberlakukannya dalam suatu bidang tertentu, atau mengenai keadaan umum yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu (Abdul Wahab, 2008).

Secara teoritik, banyak pakar telah merumuskan definisi tentang kebijakan yang merupakan terjemahan dari kata *policy* ini. Menurut Friedrich sebagaimana yang dikutip oleh Winarno (2005):

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Berkait dengan itu, Islamy (2000) mengungkapkan bahwa ada tiga elemen penting dalam pengertian sebuah kebijakan, yaitu:

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
 - 2) Taktik dari strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dan
 - 3) Penyediaan berbagai input yang memungkinkan penerapan taktik dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan.
- Masih berkai

Masih berkait dengan definisi, Mustopadijaja (2003) mencoba merumuskan lebihh operasinal lagi (*workable*), yaitu:

“Kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, Negara dan pembangunan.”

Masih menurutnya, dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan – perundang – undangan.

2. Proses Kebijakan Publik

Di dalam menetapkan proses kebijakan publik harus menyesuaikan langkah - langkah sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*)
Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?

- 2) Formulasi kebijakan (*formulation*)
Bagaimana mengembangkan pilihan – pilihan atau alternatif – alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- 3) Penentuan kebijakan (*adaption*)
Bagaiman alternative ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- 4) Implementasi (*implementation*)
Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- 5) Evaluasi (*evaluation*)
Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sementara itu dalam pandangan Ripley sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2005), tahapan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan
Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:
 - a. Membangun persepsi di kalangan *stakeholder* bahwa sebuah fenomena benar – benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
 - b. Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah – masalah tersebut.
 - c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok – kelompok politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
2. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif – alternatif kebijakan,

membangun dukungan dan melakukan negoisasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

4. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja, dan Dampak Kebijakan

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Proses sebuah kebijakan publik melewati beberapa tahap yaitu, perumusan kebijakan (formulasi), pelaksanaan kebijakan (implementasi), dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan pada proses implementasi kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan program konservasi kayu aking. Berkaitan dengan implementasi kebijakan Wahab, Abdul (2005:59) menyampaikan bahwa:

“Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran – saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Mazmania dan Sabatier mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk UU, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini

berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan UU, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan”. (Abdul Wahab, 2005:68-69)

4. Model Implementasi Kebijakan

Terdapat tiga model implementasi kebijakan yang seringkali digunakan dalam pola pelaksanaan kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Wahab, Abdul (2005:70-81), model – model tersebut antara lain:

- 1) Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (1978: 1986) yang dikenal dengan model *“the top down approach”*. Dengan model ini implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan syarat – syarat berikut:
 - a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi/badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan /kendala yang serius
 - b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber – sumber yang cukup memadai
 - c. Perpaduan sumber – sumber yang dilakukan benar – benar tersedia
 - d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
 - e. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
 - f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
 - g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
 - h. Tugas – tugas harus terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
 - i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
 - j. Pihak – pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuan yang sempurna

Model ini lebih menekankan pada kebijakan aktor pelaksana dan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan yang

akan terjadi telah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan kegiatan program berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan

2) Model yang dikembangkan oleh Meter dan Horn yang dikenal dengan model proses implementasi kebijakan. Dengan model implementasi kebijakan dipandang sebagai prosedur – prosedur yang meliputi konsep seperti perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak. Model kebijakan ini juga mempunyai variabel yang saling terkait. Variabel – variabel tersebut:

- a. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
- b. Sumber – sumber kebijaksanaan
- c. Ciri – ciri atau instansi pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksana
- e. Sikap para pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, politik

3) Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang disebut kerangka analisis implementasi. Dalam model ini implementasi kebijakan mengidentifikasi variabel – variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan – tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud adalah:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan dikerjakan dikendalikan
- b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut

Dari beberapa macam model implementasi kebijakan diatas, peneliti mengambil salah satu model yang digunakan untuk menganalisis implementasi Perda

No. 35 Tahun 2003 tentang wilayah konservasi kayu aking yaitu model implementasi yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn yang biasa disebut model “*the top down approach*” dengan mengacu pada syarat – syarat yang digunakan untuk menentukan fokus yaitu:

- a. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber – sumber yang cukup memadai
- b. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

C. Pembangunan Berkelanjutan

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat karena pembangunan adalah untuk dinikmati seluruh masyarakat dari semua lapisan tidak terkecuali untuk kalangan atas maupun bawah. Dengan demikian dalam upaya mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan seluruh rakyat dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah:

“Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Pembangunan berkelanjutan menuntut administrasi publik yang tanggap terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, baik itu lingkungan fisik alam, lingkungan ekonomi maupun lingkungan sosial. Salah satu faktor yang dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan *World Conservation Strategy* dari *The International Union for the Conservation of Nature* pada tahun 1980 seperti yang dikutip dalam jurnal sosial humaniora dari (Sariffudin dan Susanti, 2011:30). Laporan ini menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial untuk kaum miskin diseluruh dunia yang harus diberi prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Sedangkan (Budimanta, 2005:13) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah:

“Suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya”.

Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasiorientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Otto Soemarwoto dalam (Sutisna, 2006:45), mengajukan enam tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolak ukur tersebut meliputi:

- 1) Tolak ukur pro lingkungan hidup (*pro-environment*) dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya. Berbagai bentuk pencemaran lingkungan dapat menjadi indikator yang mengukur keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan. Terkait dengan tolak ukur pro lingkungan ini, Syahputra (2007) menyebutkan beberapa hal yang dapat dijadikan indikator, yaitu meliputi:
 - a. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaidah ekologi
 - b. Pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestarnya serta upaya mencari pengganti bagi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resources*)
 - c. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran
 - d. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*)
- 2) Tolak ukur pro rakyat miskin (*pro – poor*) bukan berarti anti kepada orang kaya, yang dimaksud pro rakyat miskin dalam hal ini memberikan perhatian pada rakyat miskin memerlukan perhatian khusus karena tidak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah serta tidak memiliki modal usaha sehingga daya saingnya juga rendah. Pro rakyat

miskin dapat diukur dengan indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI) yang dikembangkan PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa)

- 3) Tolak ukur pro kesetaraan gender atau pro perempuan (*pro-women*), kesetaraan gender ini dapat diukur dengan menggunakan *Genderrelated Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) untuk suatu daerah. Jika nilai GDI mendekati HDI, artinya di daerah tersebut hanya sedikit terjadi disparitas gender dan kaum perempuan telah semakin terlibat dalam proses pembangunan.
- 4) Tolak ukur pro pada kesempatan hidup atau kesempatan kerja (*pro-livelihood opportunities*) dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator seperti misalnya indikator demografi (angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan sebagainya), pendapatan perkapita, dan lain – lain
- 5) Tolak ukur pro dengan bentuk Negara kesatuan RI merupakan suatu keharusan, karena pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI
- 6) Tolak ukur anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat dilihat dari berbagai kasus yang dapat diselesaikan serta berbagai hal lain yang terkait dengan gerakan anti KKN yang diterapkan atau dilaksanakan di suatu daerah bersangkutan

D. Konservasi Wilayah Berkelanjutan

1. Pengertian Kawasan Konservasi Wilayah Berkelanjutan

Konservasi menurut IUCN adalah pengelolaan penggunaan manusia atas biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan terbesar pada generasi sekarang, sementara memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masa depan. Kawasan konservasi yang berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai kawasan yang dijadikan wilayah konservasi untuk mengembalikan kualitas ekosistem yang mengalami kerusakan agar kembali normal sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Supaya ekosistem dan sumberdaya dapat berperan secara optimal dan berkelanjutan maka diperlukan upaya –upaya perlindungan dari berbagai ancaman degradasi yang dapat ditimbulkan dari berbagai aktivitas pemanfaatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konsep perencanaan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 34 tahun 2002, bahwa wilayah pesisir yang sangat dinamik tapi rentan terhadap perubahan yang terjadi, harus dibagi ke dalam beberapa zonasi pengelolaan yakni:

1. Zona Preservasi/Zona Inti

Merupakan area yang memiliki nilai konservasi tinggi yang sangat rentan terhadap gangguan dari luar sehingga diupayakan intervensi manusia di dalamnya seminimal mungkin. Dalam pengelolaannya, zona ini harus mendapat perlindungan yang maksimum.

2. Zona Konservasi

Merupakan zona perlindungan yang di dalamnya terdapat satu atau lebih zona inti. Zona ini dapat dimanfaatkan secara sangat terbatas, yang didasarkan atas pengaturan yang ketat.

3. Zona Penyangga

Merupakan zona transisi antara zona konservasi dengan zona pemanfaatan. Pada zona ini dapat diberlakukan pengaturan disinsentif bagi pemanfaatan ruang

4. Zona Pemanfaatan (Kawasan Budidaya)

Pemanfaatan zona ini secara intensif dapat dilakukan, namun pertimbangan daya dukung lingkungan tetap merupakan persyaratan utama. Pada zona ini terdapat juga area-area yang merupakan zona perlindungan setempat

5. Zona Tertentu Pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Merupakan kawasan khusus yang diperuntukkan terutama bagi kegiatan pertahanan dan militer

Menurut UU No. 27 Tahun 2007 pasal 28 konservasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil diselenggarakan untuk:

1. Menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau – pulau kecil
2. Melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain
3. Melindungi habitat biota laut
4. Melindungi situs budaya tradisional

2. Tujuan Kawasan Konservasi

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1990 tujuan dari kawasan konservasi adalah untuk mendapatkan bentuk penataan ruang dan arah pengelolaan kawasan konservasi yang optimal sehingga dapat meningkatkan fungsi dari kawasan lindung itu sendiri serta untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. Menurut Anggoro (2006), tentang tujuan kawasan konservasi antara lain :

1. Mewujudkan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
2. Mengurangi ancaman kerusakan kawasan serta seluruh penghuninya dari bencana alam.
3. Memelihara proses dan fungsi ekologis penting dengan sistem pendukung kehidupan.
4. Menjaga dan mengendalikan keanekaragaman hayati yang ada agar tetap seimbang, harmonis dan tidak hancur/punah.

Sasaran dan manfaat yang diharapkan dari kawasan lindung adalah :

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa
2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam
3. Mempunyai manfaat dan fungsi dalam perencanaan wilayah.
4. Dapat diambil sebagai suatu peluang untuk Pengelolaan pembangunan ekonomi.
5. Dapat membantu untuk penyelesaian konflik berbagai pihak terutama pengaturan hak pengelolaan lahan, perairan dan sumberdaya alam yang ada.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 pasal 6 ayat 1, konservasi ekosistem dilakukan melalui kegiatan:

1. Perlindungan habitat dan populasi ikan
2. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan
3. Penelitian dan pengembangan
4. Pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan
5. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat
6. Pengawasan dan pengendalian
7. Monitoring dan evaluasi

Berdasarkan Pedoman Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (2003), Daerah Perlindungan Laut mempunyai tujuan:

1. Menyediakan sumber daya perikanan laut bagi masyarakat adat/lokal untuk kegiatan pemanfaatan yang didasarkan pada praktek-praktek pemanfaatan secara tradisional yang sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian.
2. Melindungi produktivitas, keragaman genetik dan species ikan melalui perlindungan habitat dan praktek penangkapan secara lestari oleh masyarakat
3. Mendorong praktek-praktek pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana

Menurut Supriharyono (2007), peningkatan kesadaran masyarakat ditujukan untuk meyakinkan kepada masyarakat pantai khususnya nelayan akan manfaat jangka panjang dari perlindungan kawasan yaitu manfaat berkelanjutan yang dihasilkan oleh usaha perlindungan kawasan. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus dilibatkan

pada identifikasi, perancangan dan pelaksanaan berbagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari usaha perlindungan kawasan konservasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 pasal 46 ayat 1 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya ikan dilakukan dengan pembinaan masyarakat.

E. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Secara *harfiah* partisipasi berarti turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan, peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan – alasan dari dalam dirinya (*intrinsic*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsic*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. (Moeliono, 2004) dalam (Fahrudin, 2005:36)

Dari sudut terminology, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non elite*) dan kelompok yang selama ini diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*elite*). Partisipasi masyarakat merupakan insentif moral sebagai “paspor” mereka untuk mempengaruhi lingkup makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan – keputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka.

Medgley (Muluk, 2007:49) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat berkonotasi *the direct involment of ordinary people in local affairs*. Partisipasi masyarakat berarti ada keterlibatan masyarakat biasa dalam urusan – urusan setempat secara langsung. Midgley memperjelas pengertian partisipasi masyarakat ini, mengacu pada salah satu definisi yang teruat dalam resolusi PBB pada awal tahun 1970-an sebagai berikut: “penciptaan peluang yang memeungkinkan semua anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmati manfaat pembangunan tersebut secara merata”.

Mengeai batasan apa yang tercakup dalam partisipasi masyarakat, Midgley (Muluk, 2007:51) mengungkapkan adanya dua pandangan. Pertama berdasarkan *United Nations Economic and Social Council Resolution 1929*. Resolusi ini menyatakan bahwa partisipasi membutuhkan keterlibatan orang – orang secara sukarela demokratis dalam hal sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan, penerimaan manfaat secara merata dan pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan serta penerapan program pembangunan social dan ekonomi.

Midgley (Muluk, 2007:51) kemudian menegaskan bahwa partisipasi masyarakat disebut tercapai apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat disebut tercapai apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif terpelihara oleh masyarakat itu sendiri setelah semua dukungan eksternal berakhir. Secara praktis, pandangan ini dianggap lebih relevan

karena mempertimbangkan kapasitas masyarakat dan mengakui adanya kebutuhan akan bantuan eksternal dalam pengembangan partisipasi masyarakat.

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela, tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropetro (1998) dalam Fahrudin (2005:37) bahwa partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Menurut Mubyarto (1985) dalam Fahrudin (2005:37) partisipasi adalah kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Menurut Sumardjo dan Saharudin dalam Fahrudin (2005:37), dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan masyarakat, maka partisipasi menyangkut keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atas suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan – tujuan masyarakat. Pada dasarnya kunci utama dari akses peran serta komuniti local adalah tingkat partisipasi yang menonjol dan kemampuan untuk membangun diri secara mandiri. Partisipasi disini dapat diartikan sebagai keterlibatan secara aktif dari anggota komuniti local tersebut dalam pembuatan keputusan tentang implementasi proses, program – program yang akan berdampak pada diri mereka. (Slocum, 1995 dalam Fahrudin, 2005:52-53)

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (1994) dalam Fahrudin (2005:44) partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi faktor – faktor yang mendukungnya, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi.
- 2) Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut.
- 3) Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu atau sarana dan material lainnya.

Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan. Manusia yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, seperti psikologis individu (*needs*, harapan, motif, *reward*), pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi, kelembagaan yang mendukung, struktur dan stratifikasi sosial, budaya local serta peraturan dan pelayanan pemerintah. Terdapat tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan, yaitu:

1) *Learning process (learning by doing)*

Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas kegiatan pelaksanaan program dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2) *Institutional development*

Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata social yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata social masyarakat merupakan daya tamping dan daya dukung sosial.

3) *Participatory*

Cara ini merupakan suatu pendekata yang umum dilakukan untuk dapat menggali *need* yang ada dalam masyarakat (Marzali, dalam Fahrudin, 2005:45)

Salah satu strategi untuk membangkitkan partisipasi aktif individu anggota masyarakat adalah melalui pendekatan kelompok. Pembangunan yang ditujukan kepada pengembangan masyarakat, akan mudah dipahami apabila melibatkan agen – agen lokal melalui suatu wadah yang dinamakan kelompok. Menurut Sumarti MC, Syaukat, dan Nuryana (2003) dalam Fahrudin (2005:47), dikarenakan dalam melakukan beragam aktivitas pencaharian nafkah, setiap orang cenderung berkelompok. Berdasarkan pandangan interaksi pembentukan kelompok, setiap orang menyadari adanya ketidakmampuan memenuhi tujuan yang diinginkan. Dengan ikatan – ikatan yang berhasil dibentuknya, kebutuhan – kebutuhan individu akan dapat dipenuhi.

Kegiatan pengembangan masyarakat memandang bahwa keberadaan kelompok pada masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan perubahan kepribadian dan memperkuat pencapaian tujuan. Penggunaan kelompok dimungkinkan terjadi, karena individu – individu anggota masyarakat yang terlibat akan menyesuaikan diri dengan salah satu perilaku kolektif. Jika masyarakat telah dapat menyesuaikan diri dengan salah satu perilaku kolektif, maka partisipasi aktif dari masyarakat akan terbentuk.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Dalam keterlibatannya, masyarakat harus memberikan dukungan semangat berupa bentuk partisipasi. Bentuk – bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dapat berupa tindakan maupun bantuan yakni sebagai berikut:

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
- b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga)
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan biaya seluruhnya oleh komunitas, (biasanya diputuskan oleh rapat komunitas, antar lain rapat desa yang menentukan anggarannya)
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat

- f. Aksi masa
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri
- h. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom

4. Tahap – Tahap Partisipasi

Partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Adi (2001:208) partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam suatu pembangunan dapat dilihat dalam 4 tahap, yaitu:

1. Tahap assesment

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang sedang terjadi merupakan pandangan mereka sendiri

2. Tahap alternatif program atau kegiatan

Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternative program

3. Tahap pelaksana (implementasi) program atau kegiatan

Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya dilapangan

4. Tahap evaluasi

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan

5. Manfaat Partisipasi

Menurut Holsteiner (1990) seperti yang dikutip Fahrudin (2005:46), partisipasi masyarakat diperlukan karena berarti:

- 1) mensukseskan program secara lebih terjamin dan cepat
- 2) mendekatkan pengertian pihak perencana atau pengelola dengan kebutuhan golongan sasaran
- 3) media untuk memupuk keterampilan masyarakat, kekeluargaan, dan kepercayaan diri
- 4) mencapai partisipasi positif sebagai ciri khas masyarakat modern

Arti penting partisipasi dapat juga dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada di dalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Mengingat fungsi dan manfaat yang dapat dipetik darinya, kini partisipasi tidak lagi dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tetapi justru sebagai hak masyarakat. (Muluk, 2005:6)

Manfaat partisipasi yang akan dirasakan oleh masyarakat menurut Suratmo (1992) seperti yang dikutip oleh Fahrudin (2005:41-42) antara lain:

- 1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik yang positif maupun yang negatif yang akan dan harus dilakukan
- 2) Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 3) Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak
- 4) Pemerintah mendapatkan informasi – informasi dari masyarakat yang belum atau tidak ada dalam Amdal, sehingga kebijaksanaan atau keputusan yang akan diambil akan lebih tepat, karena di dalam informasi tersebut sering pemerintah menemukan masalah – masalah yang penting bagi masyarakat yang belum terekam dalam laporan Amdal secara jelas terutama hal – hal yang tidak dapat dikuantitatifkan
- 5) Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenai proyek tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negatif) dan usaha – usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, sedang dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat – pendapat masyarakat serta keinginannya atau hal – hal apa yang diperlukan, sehingga salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari

- 6) Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan apabila mungkin meningkatkan manfaat tersebut (dampak positif) dan ikut menekan atau menghindarkan diri terkena dampak negatif
- 7) Dengan ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak tahap penyusunan Amdal, biasanya perhatian dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan pemrakarsa proyek pada masyarakat akan meningkat



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian ilmiah harus menggunakan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran analisa datanya. Metode penelitian ilmiah juga diterapkan pada usaha untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai kegiatan manusia dalam hubungan satu sama lainnya serta masalah yang ditimbulkan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah serta teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka jenis penelitian ini berdasarkan proses atau pendekatan analisis merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:1) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subyektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan.

Sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan karakteristik dari beberapa variable dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, seta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tertuju pada masalah penelitian dan tidak sampai menyimpang dari pokok bahasan penelitian. Menurut Moleong (2009:248) fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian dalam skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda No.35 Tahun 2003 Tentang Kawasan Konservasi Kayu Aking di Kec. Muncar yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan program konservasi yang terkait dengan sumberdaya manusia dan anggaran daerah
 - b. Komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program konservasi
 - c. Peran masing – masing stakeholder dalam pelaksanaan program konservasi

d. Hasil capaian

2. Bentuk Kegiatan Dalam Implementasi Perda No.35 Tahun 2003 Tentang Kawasan Konservasi Kayu Aking
 - a. Kegiatan dalam proses pelaksanaan konservasi kayu aking
 - b. Kegiatan dalam proses pengawasan konservasi kayu aking
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Perda No.35 Tahun 2003 Tentang Kawasan Konservasi Kayu Aking di Kec. Muncar
 - a. Faktor Pendukung
 1. Tersedianya anggaran dana dalam pelaksanaan kegiatan konservasi
 - b. Faktor Penghambat
 1. Kurangnya pemahaman dan partisipasi Dari Masyarakat
 2. Terbatasnya sumber daya manusia dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi khususnya petugas lapangan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melaksanakan penelitian, sehingga peneliti memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Muncar. Pertimbangan peneliti memilih lokasi ini adalah bahwa Kecamatan Muncar memiliki potensi yang sangat besar di sektor kelautan dan perikanan dan sebagai pusat industrialisasi perikanan yang ada di Kab. Banyuwangi.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan memperoleh validitas dan aktualisasi data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi dan Kelompok Pokwasmas Kecamatan Muncar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2009:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Ada dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Kedua data tersebut sangat penting atau diperlukan untuk ketetapan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Penjelasan mengenai dua jenis data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data atau peneliti. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dengan

demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah, data yang diperoleh dari Kepala Dinas dan pegawai yang ada di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi serta kelompok Pokwasmas Kecamatan Muncar. Dimana untuk mendapatkan data primer ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat bantu lainnya. Sumber data primer didapatkan langsung dari sumbernya (subyek penelitian) yang langsung berhubungan dengan peneliti dan maupun memberikan informasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan artikel-artikel serta arsip-arsip yang ada relevansinya dengan penelitian. Data yang peneliti ambil berasal dari dokumen dan arsip-arsip dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan jurnal di internet.

2. Sumber Data

Arikunto (2006:129) menjelaskan bahwa dalam rangka mempermudah dan mengklarifikasikan data, sumber data dapat diidentifikasi menjadi tiga yaitu:

- a. *Person*, yaitu sumber data bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan, atau jawaban tertulis melalui angket atau questioner.
- b. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, simbol, dan lainnya.
- c. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak.

Untuk itu, peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Informan, peneliti dalam menentukan informasi awal melakukan pengamatan terlebih dahulu dan pra riset, kemudian peneliti memilih informan secara *purposive*, pada subyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk mendapatkan informan selanjutnya, peneliti meminta kepada informan awal untuk menentukan siapa aktor selanjutnya yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Dokumen, yakni teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan-kebijakan yang lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang Konservasi Kayu Aking. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi informasi peneliti dan untuk mendapatkan data yang akurat.
- c. Tempat atau peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan

dengan berjalannya Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang Konservasi Kayu Aking.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting dalam melakukan penelitian karena melalui kegiatan ini dapat diperoleh data yang akan diolah menjadi informasi untuk disajikan sebagai hasil penelitian. Menurut Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2011:63) dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang lebih banyak digunakan adalah observasi berperan serta wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Observasi

Merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dengan cara mengamati bagaimana hubungan antara implementasi Perda No.35 Tahun 2003 dengan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Konservasi Kayu Aking. Dalam melakukan observasi peneliti melibatkan diri secara langsung pada situasi yang diteliti.

2. Interview (wawancara)

Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh suatu data atau informasi yang dibutuhkan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Sasaran *interview* dalam penelitian ini adalah staff bidang kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi serta ketua Pokmaswas

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data – data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen – dokumen dan foto – foto yang berkaitan dengan masalah – masalah penelitian. Dokumentasi kegiatan penelitian berupa lembar pertanyaan, rekaman wawancara serta foto – foto.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi serta untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, peneliti harus datang sendiri ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran – gambaran yang sebenarnya dari obyek yang diteliti dan kemudian menganalisis data – data yang diperoleh.

Sehubungan dengan teknik pengumpulan data, maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat dalam melakukan pengumpulan data

Antara lain:

1. Peneliti Sendiri

Yaitu dengan menggunakan panca indra dalam melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Pedoman Wawancara

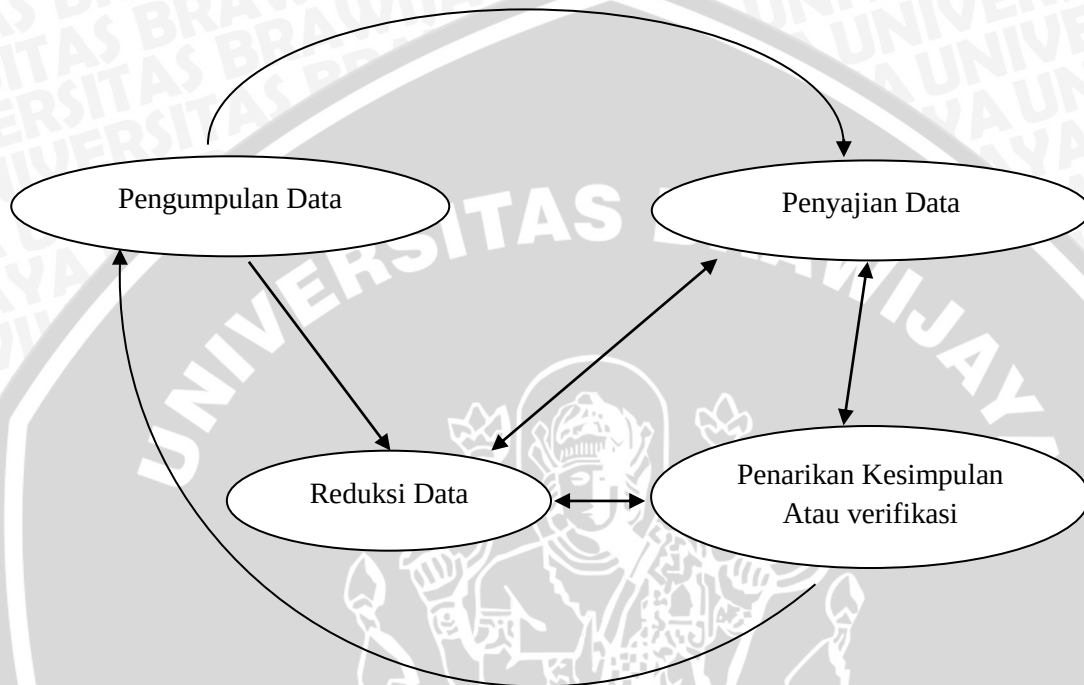
Pedoman wawancara merupakan pedoman berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan akan diajukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan pedoman berupa dokumen – dokumen yang telah ada dan digunakan dalam kegiatan operasional ditempat penelitian serta berisi data – data pendukung yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2009:248) adalah proses pengkoordinasian dan memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan Huberman yang sering disebut sebagai analisis data model interaktif. Adapun tahap – tahap analisis data kualitatif sebagai berikut dibawah ini:

Gambar 1**Model Analisis Data Miles dan Huberman**

Mencermati gambar diatas, Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247-253) berpandangan bahwa analisis data kualitatif memiliki langkah – langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang peneliti untuk memperoleh data yang valid. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data penelitian mengenai Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang Konservasi Kayu Aking.
2. Reduksi Data, yaitu memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Disini peneliti memfokuskan kepada

data – data yang berhubungan dengan pelaksanaan Perda No. 35 Tahun 2003 tentang Konservasi Kayu Aking.

3. Penyajian Data, yaitu peneliti menyusun informasi yang didapatkan selama proses pengumpulan data baik yang dilakukan di instansi terkait maupun di lapangan. Kemudian digunakan dalam melaporkan hasil penelitian, sehingga mudah untuk dipahami.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, dalam hal ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersiat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Muncar

a. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kecamatan Muncar merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang terkenal sebagai daerah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Banyuwangi dan Propinsi Jawa Timur. Kecamatan Muncar adalah wilayah kecamatan yang terletak disebelah selatan ibukota Kabupaten Banyuwangi. Letak Kecamatan Muncar berbatasan dengan Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Srono disebelah utara, Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Cluring disebelah selatan, Kecamatan Srono disebelah barat, serta Selat Bali disebelah timur.

Topografi daratan wilayah Kecamatan Muncar, menurut data dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, mempunyai kemiringan antara 0 – 8 persen, sehingga termasuk dalam kategori landai. Geografis Kecamatan Muncar berada di wilayah hamparan dan pantai di Kabupaten Banyuwangi, hal ini dapat dilihat dari ketinggian wilayah Kecamatan Muncar yang berada diketinggian antara 15 – 50m dari permukaan laut. Desa Tapanrejo memiliki ketinggian tertinggi yaitu 50 mdpl sedangkan desa yang berada di wilayah terendah adalah Desa Kemendung, Sumbersewu, Kedungringin, dan Wringinputih yaitu dengan ketinggian rata – rata 15 mdpl, dimana desa – desa berbatasan langsung dengan Selat Bali.

Luas wilayah Kecamatan Muncar sekitar 76,90 km². Kecamatan Muncar secara administratif terbagi menjadi 10 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Wilayah Administrasi Kecamatan Muncar

No	Desa	Luas Wilayah
1	Wringinputih	15,24 km ²
2	Kedungringin	4,73 km ²
3	Tambakrejo	7,48 km ²
4	Tapanrejo	10,41 km ²
5	Blambangan	7,05 km ²
6	Kedungrejo	6,63 km ²
7	Tembokrejo	5,48 km ²
8	Sumbersewu	5,10 km ²
9	Kemendung	5,36 km ²
10	Sumberberas	9,42 km ²
	Jumlah	76,90 km ²

Sumber: Statistik Kecamatan Muncar 2013

Panjang garis pantai yang melewati Kecamatan Muncar melintasi 5 desa yaitu Desa Kumendung, Desa Sumbersewu, Desa Tembokrejo, Desa Kedungrejo, Desa Kedungringin, Desa Wringinputih. Sektor perikanan yang berkembang di wilayah tersebut adalah perikanan laut, tambak dan potensi pesisir disepanjang pantai. Kegiatan perikanan laut sangat berkembang di Kecamatan Muncar terutama di Pantai Muncar yang didukung oleh adanya pelabuhan ikan terbesar kedua di Indonesia, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar. Adapun jenis ikan yang memiliki potensi

dan merupakan produk unggulan PPP Muncar adalah ikan lemuru yang menjadi bahan utama industri pengalengan ikan atau sarden yang ada di Muncar.

Tabel 4

Produksi Perikanan Muncar Per Jenis Komoditas Tahun 2011 - 2012

NO.	JENIS KOMODITAS	Produksi (Kg)		Nilai Produksi (Rp)	
		2011	2012	2011	2012
1	Layang	5,663,004	14,493,320	62,345,162,000	107,975,234,000
2	Bawal	-	6,775	-	116,030,000
3	Kembung	151,024	734,765	1,235,787,250	5,216,831,500
4	Selar	-	372,845	-	1,603,233,500
5	Tembang	-	406,013	-	1,664,653,300
6	Udang barong / udang karang	-	20,301	-	2,521,384,200
7	Udang lainnya	102,242	621,964	2,006,163,250	8,268,706,100
8	Rebon	68,094	-	273,297,750	
9	T e r i	109,414	580,378	616,016,250	2,292,491,125
10	Tongkol	4,635,851	6,338,808	43,738,442,000	50,058,897,850
11	Lemuru	23,805,661	6,054,319	173,815,410,250	22,400,980,300
12	Cakalang	369,282	1,032,521	5,193,645,500	10,015,453,700
13	Tuna	311,203	142,491	7,174,791,250	4,410,080,975
14	Tengiri	136,837	203,665	3,100,376,000	6,344,149,175
15	Layur	1,037,939	1,756,220	13,307,322,000	30,294,795,000
16	Julung-julung	-	3,975	-	47,700,000
17	Ekor Merah	12,491	-	-	-
18	Kuwe / Putih	192,975	328,294	3,146,147,000	5,482,509,800
19	Petek	113,127	-	567,826,250	

20	Cucut	733,800	444,604	5,286,063,750	6,669,060,000
21	P a r i	364,112	313,712	2,245,143,750	2,183,018,100
22	Kakap putih	135,496	434,254	2,270,391,500	10,986,626,200
23	Kakap merah / Bambangan	177,882	267,934	2,772,059,250	7,381,581,700
24	Kerapu	65,742	769,564	1,194,701,750	22,953,985,475
25	Belanak	103,948	770,666	664,019,250	6,049,724,175
26	Manyung	18,232	958,913	153,156,750	4,698,671,250
27	Cumi-cumi	423,905	2,142,591	7,740,775,250	45,101,530,025
28	Rajungan	80,281	303,821	1,591,404,000	4,845,951,330
29	Kepiting	73,060	220,294	1,240,340,250	6,179,232,675
30	Kerang	429	2,490,054	-	10,892,446,000
31	Kerang- kerangan	150,935	-	302,618,000	-
32	Ubur-ubur	-	-	-	-
33	Rumput Laut	-	-	-	-
34	Lain-lain	1,388,881	2,256,287	8,082,579,500	19,376,659,150

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi Tahun 2012

b. Penduduk

Penduduk Kecamatan Muncar pada tahun 2012 adalah 127.737 jiwa, terdiri dari 65.332 laki – laki dan 64.405 perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada di desa Tembokrejo dengan jumlah 28.917 jiwa. Desa dengan jumlah penduduk terbesar selanjutnya adalah desa Kedungrejo dengan 27.407 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di desa Tambakrejo dengan jumlah penduduk 5.764 jiwa. Kepadatan penduduk Kecamatan Muncar tahun 2012 mengalami kenaikan dari tahun 2011

menjadi 1.687 jiwa per km² dengan desa terpadat adalah desa Tembokrejo yaitu 5.277 jiwa per km², wilayah dengan kepadatan terendah adalah desa Tapanrejo sebesar 726 jiwa per km².

c. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk bekerja di Kecamatan Muncar pada tahun 2012 adalah 61.063 jiwa. Dengan kata lain jumlah penduduk Kecamatan Muncar yang bekerja pada tahun 2012 adalah 62,17 persen dari seluruh jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Penduduk Kecamatan Muncar khususnya yang berada di daerah wilayah pesisir dominan yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 5

Data Jumlah Tenaga Kerja Nelayan di Muncar Tahun 2008 – 2012

No	Tahun	Nelayan/Perikanan	Perairan Umum	Jumlah
1	2008	12.575	61	12.636
2	2009	12.865	61	13.376
3	2010	14.624	115	15.189
4	2011	13.181	115	14.112
5	2012	13.200	60	14.451

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi Tahun 2008 - 2011

d. Kondisi Ekosistem

1. Ekosistem Pesisir Terumbu Karang Teluk Pang Pang

Teluk Pang pang terletak di Kecamatan Muncar dan Kecamatan Tegaldimo, Sepanjang area Blimbingsari, Bomo dan Sumber Sewu dijumpai terumbu karang mati yang tertutup turf algae dan lumpur, dan tidak dijumpai adanya karang bercabang baik dari famili Acroporidae maupun famili lainnya. Karang yang dijumpai kebanyakan merupakan jenis yang tahan terhadap kekeruhan seperti jenis karang masif (seperti *Favites* spp, *Porites* spp dan *Palmygira* sp), karang submasif (*Goniopora* sp, *Sympilia* sp), karang merayap (*Leptoseris* sp), mushroom coral (*Heliofungia actiniformis* dan *Halomitra pileus*). Jenis dominan adalah *Goniopora* sp dan berbagai jenis sponge seperti *Haliclona* sp, *Xestospongia testudinaria*, *Plakortis nigra* dan *Gelliodes* sp. Jenis fauna yang cukup menarik adalah tube anemone *Ceriantus* sp, christmas tree worm *Spirobranchus giganteus*, anemone *stichodactyla* sp dan kima *Tridacna* sp. Saat ini kondisi habitat terumbu karang tergolong jelek dengan tutupan karang dari 5 %.

2. Mangrove

Mangrove banyak dijumpai di Teluk Pang Pang (Kecamatan Muncar dan Tegaldimo), Habitat mangrove melingkari Teluk Pang Pang seluas kira-kira 600 Ha. Luas Mangrove di Kecamatan Muncar yaitu 525 Ha yang terbagi di Kelurahan Waringin Putih sebesar 450 Ha dan Kelurahan Kedengringain

sebesar 75 Ha. Formasi hutan mangrove dijumpai mulai batas Tratas, Kabat Mantren, Tegal Pare, dan Tegaldimo. Hutan mangrove Teluk Pang Pang menyusun formasi mengelilingi teluk. Sedangkan diluar Teluk Pang Pang yaitu Tanjung Sembulungan sekitar hutan Purwo juga ditumbuhi formasi hutan mangrove sampai kebagian selatan dikawasan segoro anakan Hutan Purwo. Jenis Mangrove dikawasan ini adalah : Avicennia, Sonneratia, Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Lumnitzera, Excoecaria dll. Pada kawasan sisi timur Teluk Pang Pang terdapat kawasan hutan mangrove alami dengan ketebalan berkisar antara 30-400 meter. Formasi hutan mangrove yang dijumpai di sisi barat Teluk Pang Pang diawali dengan Rhizophora apiculata pada zona terdepan yang berbatasan dengan laut dan diselingi oleh Sonneratia alba dan Rhizophora mucronata. Kawasan disisi sebelah barat Teluk Pang Pang merupakan bagian dari Kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Jenis tumbuhan dominan di hutan ini adalah Bambusa spp, Salweenia malabarica, Ficus spp, Sterculia foetida, Terminalia catappa, Thespesia populnea , Corypha utan, Borassus Flabellifer, Vitex pubescens, vitex trifolia, Ceiba pentandra, dan Croton tiglium.

Pada kawasan sisi selatan Teluk Pang Pang terdapat kawasan hutan mangrove alami dengan ketebalan sekitar 1.000 meter. Zonasi Mangrove disisi selatan relatif sama dengan zonasi mangrove yang dijumpai disisi barat teluk. Zona Rhizophora yang terletak paling luar mengindikasikan jenis substrat dominan lumpur dengan genangan pasang surut dengan tinggi pasang

normal. Sonneratia banyak dijumpai berasosiasi dengan Rhizophora dengan substrat cenderung berlumpur dangkal, kandungan bahan organik rendah dan kandungan garam/salinitas agak tinggi. Tiga sungai yang bermuara disisi selatan Teluk Pang Pang diduga memiliki kontribusi cukup besar pada deposisi sedimen yang mempercepat terbentuknya substrat baru bagi perluasan kawasan mangrove. Mangrove di kawasan sisi sebelah barat Teluk Pang Pang merupakan hasil penanaman oleh masyarakat dengan ketebalan ± 100 meter dan bibit mangrove yang digunakan adalah Rhizophora mucronata. Penanaman mangrove tersebut menggunakan teknik/sistem banjar.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

a. Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan instansi pemerintah yang berperan aktif dalam menjalankan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Dinas Kelautan dan Perikanan ini dipusatkan pada tiga titik yaitu di Pusat secara nasional, di Provinsi dan di Kabupaten/Kota yang memiliki sumberdaya laut dan perikanan. Termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar di Jawa Timur. Oleh karena itu perlunya dukungan dari pemerintah dalam pengelolaan hasil bumi ini melalui pengawasan dan kontrol langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan. Eksistensi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan daerah dan memiliki peran dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan khususnya bidang kelautan dan perikanan. Diharapkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di Banyuwangi ini, semua hasil sumberdaya kelautan dan perikanan yang di Banyuwangi ini bisa dikontrol dalam pengelolaannya.

Dalam proses pengelolaan sumberdaya kelautan ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang berbasis pengetahuan dan berkelanjutan. Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi difokuskan kepada peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, perlindungan usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan serta pemberdayaan masyarakat pesisir lainnya dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahunan. Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi, yakni:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Visi dan Misi

Sedangkan visi dan misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi diantaranya :

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi mempunyai visi sebagai berikut: “Terwujudnya Usaha Kelautan dan Perikanan Yang Maju dan Lestari Untuk Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat”. Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan secara profesional, mengedepankan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat kelautan dan perikanan namun tetap sesuai dengan peraturan/perundang - undangan, dan menghasilkan pembangunan sektor kelautan

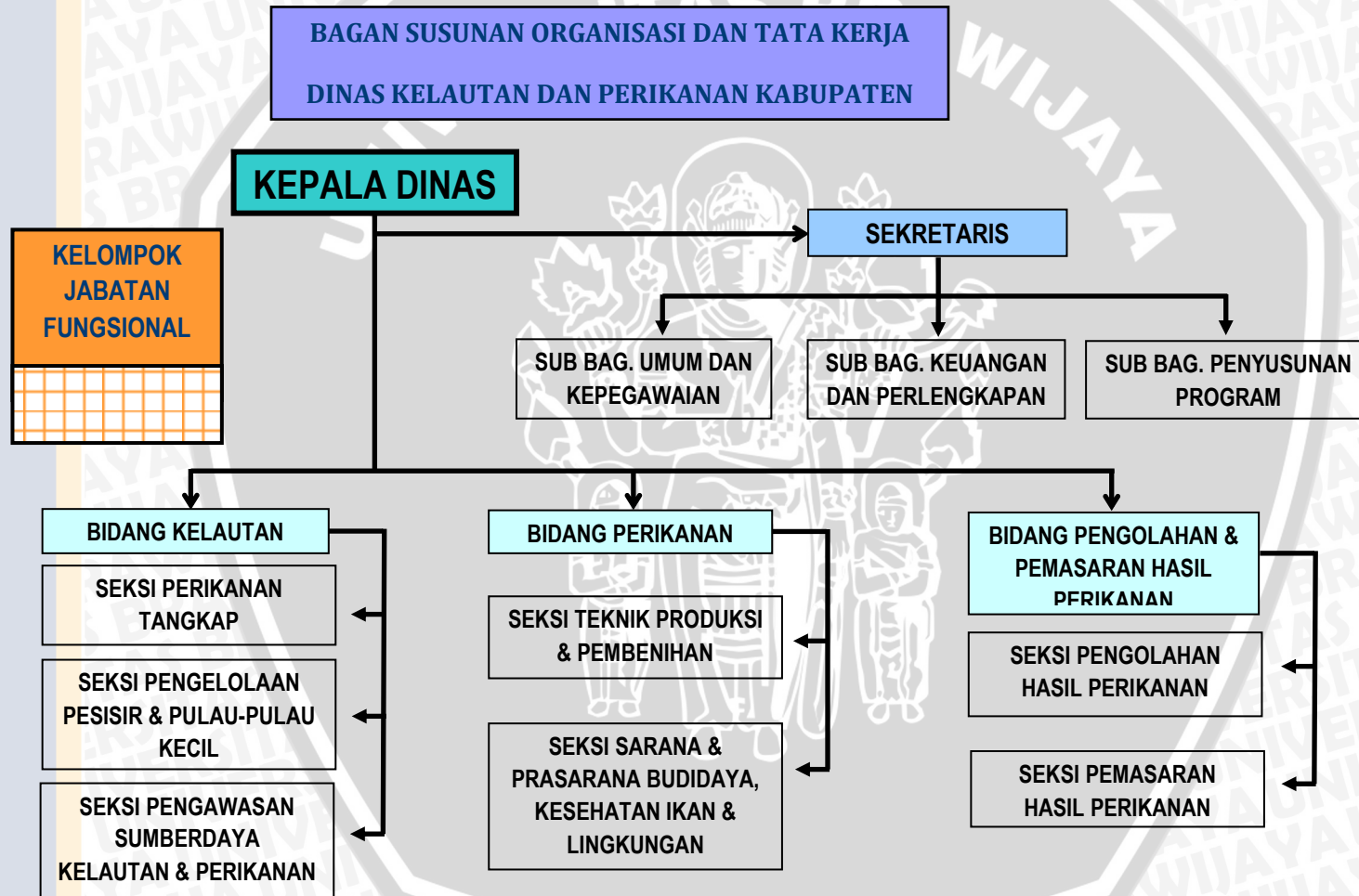
dan perikanan yang berkualitas sehingga ikut mendukung visi pembangunan Kabupaten Banyuwangi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia.”

2. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang lestari dan berkelanjutan
- b. Mewujudkan usaha budidaya perikanan yang berkembang dan kuat
- c. Mewujudkan produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing
- d. Meningkatkan kapabilitas SDM masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
- e. Mewujudkan sistem pelayanan publik yang baik di bidang pembangunan kelautan dan perikanan
- f. Mewujudkan tata kelola instansi Dinas Kelautan dan Perikanan yang baik dan bersih

c. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

Gambar 2



d. Tugas Pokok Perbidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

Uraian tugas dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan, mempunyai tugas :
- menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
 - menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
 - melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh:

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- Menyusun rencana sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja badan;

- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana sub bagian keuangan dan perlengkapan sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
- f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.3 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan programsesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program,kegiatan dan anggaran dinas;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
- d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yangbaik dan saling mendukung;
- e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangankarier;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

3. Kepala Bidang Kelautan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Bidang Kelautan sesuai dengan rencana kerja Dinas
- b. merencanakan pengelolaan potensi sumberdaya kelautan;
- c. menyusun dan mengatur tata ruang eksplorasi,eskploitasi, konservasi sumberdaya kelautan, termasuk suaka laut di wilayah Kabupaten Banyuwangi;

- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi sertapemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi pembangunandan rehabilitasi, sarana dan prasarana dasar bidangkelautan;
- f. melaksanakan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan dibidang kelautan;
- g. melaksanakan bimbingan, menegakkan hukum serta operasi pengawasan sumber daya kelautan;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelautan;
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yangbaik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangankarier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kelautan dibantu oleh:

3.1 Kepala Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Perikanan Tangkap sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. melaksanakan identifikasi, inventarisasi lokasi temuan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), tambang laut, suaka laut;

- c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, perencanaan pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- d. menyusun, merencanakan dan melaksanakan program eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan;
- e. melaksanakan pengembangan dan rekayasa teknologi penangkapan ikan;
- f. melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan terhadap masyarakat perikanan tangkap.
- g. melaksanakan pengembangan pelayanan tempat pelelangan ikan.
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembang karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.2 Kepala Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi potensi sumber daya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyusun dan merencanakan tata ruang pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;

- d. merencanakan kebutuhan pendayagunaan lembaga, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat pesisir;
- e. melaksanakan perhitungan dan pemetaan potensi kerusakan terhadap sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. melaksanakan penyusunan dan perencanaan konservasi, mitigasi bencana;
- g. memberikan bimbingan dan pembinaan pengelolaan sumberdaya ikan terhadap nelayan;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.3 Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan daerah rawan pelanggaran kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pemetaan pengawasan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;

- d. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan bimbingan, menegakkan hukum serta operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pokok dan fungsinya;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4. Kepala Bidang Perikanan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan atau pengelolaan perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan perikanan budidaya;
 - d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan polapenyebaran hama dan penyakit ikan;
 - e. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;

- f. merencanakan pola pengembangan, perekayasaanteknologi dan pengembangan komoditas unggulanperikanan budidaya;
- g. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perencanaanpengembangan, rehabilitasi dan pembangunan saranadan prasarana dasar bidang perikanan budidaya;
- h. melaksanakan bimbingan, dan pembinaan untukmenumbuhkan minat masyarakat terhadap perikananbudidaya;
- i. melaksanakan pengawasan peredaran OIKB (Obat IkanKimia dan Biologi) dan peredaran ikan hidup bagi usahaperikanan budidaya;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan danpengendalian pengelolaan budidaya perikanan danperairan umum;
- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yangbaik dan saling mendukung;
- l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangankarier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh:

4.1 Kepala Seksi Teknik Produksi dan Perbenihan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Seksi Teknik Produksi dan Perbenihan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan perikanan budidaya;
- c. menyusun, merencanakan dan memetakan kawasan perikanan budidaya untuk pengembangan komoditi unggulan berdasarkan potensi wilayah;
- d. melaksanakan perekayasa teknologi perikanan budidaya di Balai Benih Ikan (BBI)
- e. menyusun dan melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi, dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di sentra-sentra kawasan perikanan budidaya dan BBI;
- f. melaksanakan bimbingan, pembinaan, penyuluhan teknis perikanan budidaya dan menumbuhkembangkan kelompok-kelompok pembudidaya ikan;
- g. melaksanakan dan memfasilitasi pengujian sertifikasi dan penyediaan induk unggul, benih unggul bagi pembudidaya ikan;
- h. melaksanakan Sosialisasi, Persiapan dan Pengembangan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik);
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan;
- j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- l. melaksanakan tugas Kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.2 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola penyebaran hama dan penyakit ikan;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perencanaan pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang perikanan budidaya;
- d. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- e. melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan teknik penanggulangan hama dan penyakit ikan dan pola penyebarannya;
- f. melaksanakan pengawasan peredaran OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi) dan peredaran ikan hidup bagi usaha perikanan budidaya;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perairan umum;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis pengolahan pemasaran hasil perikanan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. merencanakan dan perekayasa teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perencanaan pengembangan, rehabilitasi, pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. melaksanakan bimbingan, dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan dibantu oleh:

5.1 Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Seksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha-usaha pengolahan hasil perikanan;
- c. melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengembangan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar pengolahan hasil perikanan yang disesuaikan dengan potensi.
- d. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis serta diseminasi teknologi pengolahan hasil perikanan termasuk pengembangan sistem rantai dingin (cold chain system) di sentra-sentra produksi;
- e. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan serta cara pengolahan hasil perikanan yang baik.
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil perikanan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

5.2 Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Seksi Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha-usaha pemasaran hasil perikanan;
- c. melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar pemasaran hasil perikanan yang disesuaikan dengan potensi;
- d. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan dan peningkatan konsumsi makan ikan;
- e. menyiapkan bahan dan informasi pengembangan investasi usaha hasil perikanan dan data informasi pasar;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemasaran hasil perikanan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- i. melaksanakan tugas Kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

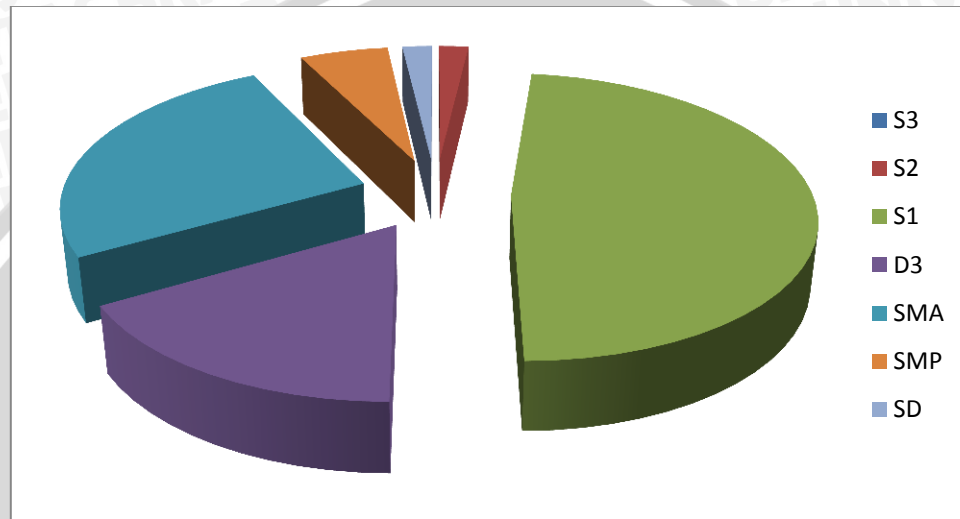
e. Komposisi dan Jumlah Pegawai

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi terdiri dari berbagai jenis tingkat pendidikan dengan mayoritas berlatar-belakang pendidikan perikanan dan pertanian. Beberapa pegawai ada yang berlatar belakang ilmu administrasi, pemerintahan dan ilmu teknik kelautan. Para pegawai juga terdiri dari berbagai tingkatan pangkat/golongan ruang serta masa kerja. Semua kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat dalam gambar grafik berikut ini :

Gambar 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



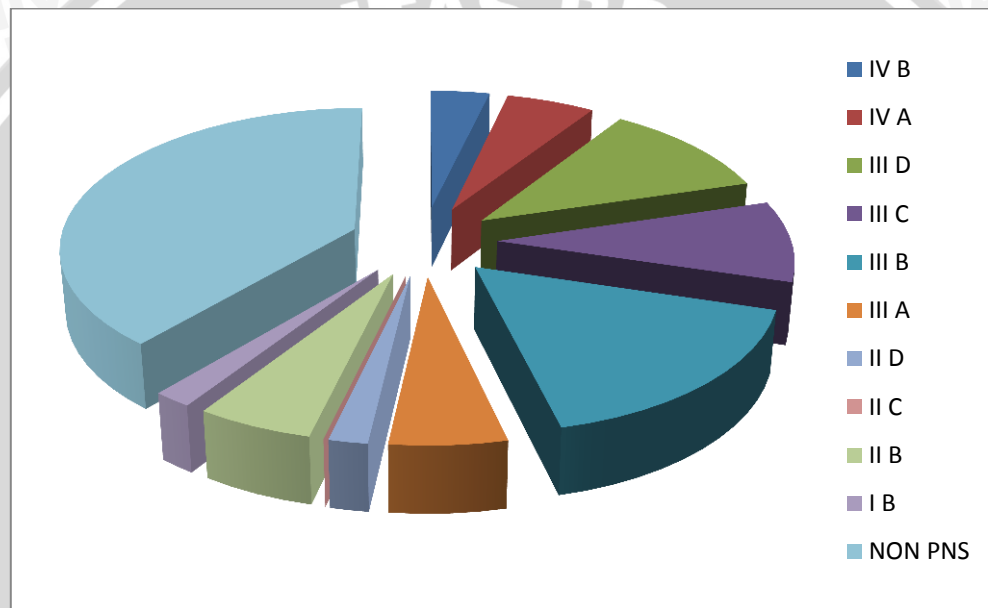
Sumber: LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi Tahun 2012

Total jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 adalah 54 orang. Berdasarkan grafik di atas, untuk pegawai dengan klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3 (S3) tidak ada. Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang atau proporsinya sebesar 1,8% persen dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 26 orang dengan proporsi 48,15 persen dari keseluruhan jumlah pegawai, klasifikasi D3 berjumlah 9 orang atau sebesar 16,67 persen dari jumlah pegawai, untuk klasifikasi SMA/SMK berjumlah 14 orang dengan proporsi 25,92 persen dari seluruh jumlah pegawai. Dan klasifikasi SMP dan SD berjumlah 4 orang dengan proporsi 7,41 persen dari agregat jumlah pegawai.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenjang kepangkatannya dan Golongannya, dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber: LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi Tahun 2012

Berdasarkan grafik di atas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh pegawai non PNS yaitu berjumlah 21 orang atau 38 persen dari total jumlah pegawai. Untuk karyawan dengan status PNS, berjumlah 33 atau 61 persen. Pegawai PNS didominasi oleh golongan dan pangkat III/b (Penata Muda Tingkat I) yaitu berjumlah 9 orang atau 27 persen dari seluruh jumlah pegawai PNS.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 Tentang Konservasi Kayu Aking

Pemerintah daerah (*local government*) adalah bagian dari pemerintahan suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang – Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintah yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam kekuasaannya. Muncar yang merupakan daerah terbesar di Banyuwangi juga merupakan daerah penghasil dan pusat perikanan terbesar di Banyuwangi. Eksploitasi perikanan di Selat Bali sebagai ikan isyu biologis, mulai kritis dan komposisi hasil tangkapan lebih dari 70,00% adalah ikan lemuru (*sardinella lemuru*). Ikan lemuru ditangkap oleh nelayan dalam berbagai ukuran, yaitu kecil (*sempenit* dan *protolan*) dan ukuran besar (*lemuru* dan *lemuru kucing*). Jenis ikan isyu ekonomis tergolong ikan pelagis kecil ekonomis penting lainnya adalah ikan tongkol (*auxis* sp) dan ikan layang (*decapterus* spp). Jenis ikan ekonomis penting lain diantaranya adalah jenis ikan layur (*trichiurus* spp), ikan tembang (*clupea* spp) dan ikan kembung (*rastalliger* spp). Musim penangkapan ikan terjadi pada musim Barat Laut antara bulan September – Januari. Namun demikian selama tahun 2000-2004 telah terjadi perubahan kondisi sumber daya ikan lemuru dan menunjukkan bergeseran musim ikan, dimana pada bulan September yang seharusnya musim ikan, bahkan pada tahun 2004 menunjukkan kondisi musim paceklik.

Tabel 6

Potensi Perairan Kecamatan Muncar

No.	Potensi	Keterangan
1.	Perairan Selat Bali	Selat Bali dengan potensi SDI MSY = 46.400 ton/tahun; TAC = 37.120 ton/tahun jenis pelagis kecil (dominan lemuru, tembang, tongkol, layang, kembung, layur selar), demersal (petek, udang, dan lobster) dan cumi, kerang. Dimana 70% lebih adalah ikan lemuru.
2.	Perairan Teluk Pang Pang	Perairan Pang Pang dengan klorofil dan kecerahan cocok untuk budidaya laut, tambak dan kerang-kerangan.
3.	Mangrove	Ekosistem mangrove terdapat di Teluk Pang pang dari jenis Rhizopora dan Avicenia. Keberadaan mangrove dengan sistem perakarannya dapat menyerap partikel-partikel sedimen terlarut dalam air sungai yang masuk ke perairan teluk sehingga diharapkan dapat menjaga kejernihan air.
4.	Terumbu karang	Wilayah perairan di kabupaten Banyuwangi memiliki daerah terumbu karang di Selat Bali yaitu di sekitar P. Tabuhan, Teluk Pang pang dan Tanjung Simbulungan. Teluk pang pang cocok untuk transplantasi terumbu karang.
5.	Budidaya laut	Keramba Jaring Apung (kerapu, udang, barong), resvat kepiting bakau. Meningkatnya permintaan pasar udang di manca negara yang didukung dengan pola usaha intensif, banyak kegiatan usaha tambak udang menerapkan teknologi yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan sehingga terjadi penurunan kualitas tambak.
6.	Rumput laut	Daerah yang cocok untuk budidaya rumput laut jenis cottoni. Potensi 800 unit, sedang yang beroperasi 200 unit.
7.	Budidaya KJA	Potensi keramba jaring apung 700 unit (6 petak/unit dan 3 x 3 m per petak)
8.	Budidaya payau	Potensi tambak seluas 12.279 ha
9.	Industri pengolahan ikan	- Perusahaan (ikan kaleng unit, minyak ikan 11 unit, tepung ikan 34 unit, cold storage 30 unit, pabrik es 5 unit, budidaya mutiara 1 unit) - Perorangan (pindang 22 unit, pengasinan, pengolahan ubur-ubur, terasi, budidaya lobster) - Perusahaan ekspor
10.	Kawasan pelabuhan	Pelabuhan perikanan pantai, industri pengolahan ikan dan tambak.

Sumber: Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2008

Di Muncar terdapat industri berskala kecil atau rumah tangga hingga industri berskala besar. Industri yang ada di Muncar kebanyakan merupakan industri di bidang pengalengan ikan atau yang biasa dikenal dengan sarden. Namun dengan berjalannya waktu, beberapa permasalahan di wilayah pesisir Muncar bermunculan mulai dari masalah utama yaitu mengenai hasil produksi perikanan yang notabene merupakan bahan baku dalam produksi industri pengalengan di Muncar, mengalami turun naik dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wingking (2013:114) tentang implikasi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang menyatakan bahwa menurunnya hasil tangkapan lemuru berdampak pada penurunan pendapatan dari masyarakat yang utamanya berprofesi sebagai nelayan. Pada tahun 2009, hasil produksi ikan lemuru yang di dapat oleh nelayan sebesar 28.446 ton, kemudian di tahun 2010 hasil tangkapan ikan lemuru nelayan mengalami penurunan hingga sebesar 17.717 ton, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2011 hasil produksi perikanan lemuru nelayan di Muncar hanya mencapai 1.651 ton saja (Muncar dalam angka 2012). Hal ini diakibatkan karena nelayan dalam mencari ikan masih menggunakan bahan kimia berbahaya seperti bom dari *potassium cyanida* maupun alat yang dapat merusak ekosistem sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem wilayah pesisir di Muncar tidak dapat di cegah lagi dan juga masalah dari segi sumber daya manusia di Kecamatan Muncar yang masih berpendidikan rendah. Tidak hanya itu saja, masih banyak permasalahan yang terjadi di Kecamatan Muncar seperti yang ada di tabel di bawah ini:

Tabel 7

Identifikasi Permasalahan di Perairan Kecamatan Muncar

No.	Identifikasi Permasalahan	Penyebab Permasalahan	Lokasi	Rencana Penanggulangan
1.	Beban Sumber Daya Ikan	a. Pemanfaatan SDI tidak merata, sebagian besar kegiatan penangkapan ikan terpusat di Selata Bali menjadikan pengelolaannya sangat intensif, yang mengarah kepada kondisi overfishing. b. Masih banyak ditemui tindak pelanggaran penangkapan ikan dengan menggunakan bahan / alat tidak ramah lingkungan, seperti pottasium, bahan peledak, ukuran mata jaring yang melanggar ketentuan. Dampaknya bisa merusak kelestarian SDI	Selat Bali	a. Di perairan laut yang padat tangkap diupayakan tidak ada penambahan izin baru, sedangkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha penangkapan diarahkan agar dapat menjangkau daerah penangkapan yang lebih jauh ke daerah yang masih potensial. b. Guna menunjang pengembangan perikanan tangkap ke fishing groun yang baru dan lebih jauh dibanding saat ini, maka perlu prasarana dan sarana pendaratan yang memadai yaitu adanya pelabuhan yang dapat memberi kemudahan nelayan dalam mempersiapkan operasi penangkapan serta mendaratkan hasilnya. c. Supaya nelayan memenuhi persyaratan ketrampilan menjangkau daerah penangkapan yang lebih jauh, maka harus dilakukan pendidikan /

No.	Identifikasi Permasalahan	Penyebab Permasalahan	Lokasi	Rencana Penanggulangan
				pelatihan nelayan untuk memperoleh SKI 30-60 mil agar bisa menjangkau ke ZEEI. Disamping itu perlu diimbangi pelatihan tentang pembinaan mutu hasil perikanan (fish handling) agar hasil tangkapan sampai di darat masih tetap segar dan berkualitas. d. Pemasangan rumpon laut dalam maupun terumbu karang buatan yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya ikan. e. Pemahaman terhadap hukum dan peraturan perundangan perikanan
2.	Beban SDM (khususnya nelayan)	a. Berpendidikan rendah b. Sulit menerima perubahan, fanatik terhadap jenis alat tangkap tertentu walaupun sesungguhnya sudah tidak efektif dan bahaya. c. Kepercayaan yang berlaku d. Tidak berani mengambil resiko	Nelayan Muncar	Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program PEMP

No.	Identifikasi Permasalahan	Penyebab Permasalahan	Lokasi	Rencana Penanggulangan
3.	Kerusakan terumbu karang	Penggalian, bahan peledak, alat tangkap	Sekitar Teluk Pang pang	Transplantasi, karang buatan dan pengawasan
4.	Penurunan populasi ikan	Bahan peledak, potasium, alat tangkap yang tiak sesuai	Sekitar Pulau Tabuhan, Teluk Pang pang	Menerapkan batas-batas jalur penangkapan sesuai keputusan Mentan SK bersama gubernur Jatim dan Bali

Sumber: Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2008

Untuk meminimalisir dari pengaruh rusaknya ekosistem pesisir muncar yang mengakibatkan turun naiknya hasil produksi perikanan di Muncar, Pemerintah Daerah Kab. Banyuwangi bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi melakukan kegiatan konservasi berwawasan lingkungan untuk tetap menjaga kualitas wilayah pesisir di Muncar tetap baik dan tidak mengalami kerusakan. Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kab. Banyuwangi bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi mengeluarkan Perda No. 35 Tahun 2003 tentang Konservasi Kayu Aking yang dilakukan di wilayah pesisir Muncar. Konservasi Kayu Aking merupakan salah satu jenis kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi untuk mencegah kerusakan ekosistem pesisir dan memperbaiki kualitas wilayah pesisir yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya di daerah Kecamatan Muncar yang merupakan daerah pusat perikanan terbesar di Banyuwangi dan di Jawa Timur. Saat ini kualitas ekosistem wilayah pesisir di Muncar mengalami kerusakan yang hampir bisa dikatakan rusak yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem terumbu karang akibat pengeboman oleh nelayan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya dalam mencari ikan, kesadaran dari masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di sepanjang pinggir pantai yaitu dengan membuang sampah rumah tangga di laut, dan juga masih banyak industri perikanan baik yang berskala kecil hingga besar

membuang limbah pabriknya langsung ke laut tanpa adanya proses pengolahan. Konservasi Kayu Aking yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan mulai tahun 2003 hingga sekarang.

Hal ini dilakukan selain dari amanat yang diberikan oleh Dirjen Kelautan maupun Kementerian Kelautan untuk menjaga kualitas perairan laut di Muncar karena Muncar merupakan salah satu wilayah dimana sebagai daerah penghasil produksi perikanan terbesar kedua setelah Bagan Siapi – api yang saat ini juga mengalami kerusakan wilayah laut yang hampir parah kerusakannya. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas ekosistem wilayah pesisir dan laut di Muncar dan menjaga produksi perikanan di Muncar, dilakukan kegiatan konservasi kayu aking untuk memulihkan dan memperbaiki dari kualitas ekosistem di Muncar. Luas wilayah konservasi kayu aking yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Muncar sebesar 289,23 hektar dari total luas wilayah pesisir yang ada di Banyuwangi yaitu 175,8 km. Hal ini dilakukan di Muncar karena Dinas Kelautan dan Perikanan menganggap di Muncar lah yang mengalami kerusakan terparah ekosistem pesisirnya sehingga perlu dilakukannya konservasi terlebih dahulu di Muncar. Kawasan konservasi kayu aking yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi meliputi:

1. Koordinat 08°27'34,2" LS (dibaca 8 derajat 27 menit 34,2 detik lintang selatan) Tanjung Ikan ke koordinat 08° 30'20,3 LS (dibaca 8 derajat 30 menit 20,3 detik lintang selatan) Tanjung Weringinan.

2. Koordinat 114°24'07,2" BT (dibaca 114 derajat 24 menit 07,2 detik bujur timur) Tanjung Ikan ke koordinat 114°24'35,1" BT (dibaca 114 derajat 24 menit 35,1 detik bujur timur) Tanjung Werimnginan.

Nama Konservasi Kayu Aking sendiri merupakan istilah yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dalam kegiatan pencegahan kerusakan yang ada di wilayah pesisir di Muncar yang diakibatkan oleh 2 faktor yaitu faktor alam (global warming, abrasi) dan faktor manusia (pencemaran, over eksploitasi hasil perikanan, serta penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam mencari ikan). Yang melatar belakangi dibentuknya kawasan konservasi kayu aking adalah melihat kondisi kawasan peisisir di Muncar yang merupakan daerah pusat industrialisasi berbasis perikanan dan kelautan yang mengalami kerusakan baik dari segi rusaknya terumbu karang dan bakau atau mangrove akibat kurangnya pengetahuan dari nelayan dan juga penangkapan sumber daya ikan yang menggunakan bahan kimia berbahaya seperti *potassium cyanida* yang dapat menghancurkan terumbu karang, pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan, hingga pengambilan ikan secara eksploitatif atau secara berlebihan. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan konservasi karena jika tidak dilakukan kegiatan konservasi sesegera mungkin, hal ini akan menyebabkan kerusakan ekosistem wilayah pesisir di Muncar semakin parah.

Tujuan dari pelaksanaan konservasi kayu aking menurut penjelasan dalam Perda No. 35 Tahun 2003 adalah:

- a. Membentuk suatu daerah yang dilindungi yang bebas dari kegiatan ekstraktif dan destruktif
- b. Meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumberdaya ikan dan biota lainnya
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya perikanan pantai
- d. Meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam usaha pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan dan biota lainnya
- e. Menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap sumberdaya ikan dan biota lainnya
- f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Banyuwangi seutuhnya

Sedangkan sasaran di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking adalah:

- a. Terbentuknya daerah laut lindung berbasis masyarakat
- b. Terbentuknya pola kesadaran masyarakat tentang pola pelestarian dan pengelolaan laut lindung beserta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya
- c. Tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan sumberdaya ikan beserta biota lainnya
- d. Tercapainya kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya
- e. Terkendali dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota lainnya

Didalam pelaksanaan konservasi kayu aking, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan konservasi kayu aking. Stakeholder tersebut diantaranya adalah:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi,
2. Masyarakat Muncar khususnya nelayan,
3. Polisi,
4. Angkatan Laut,
5. Polisi Perairan Laut, dan
6. Pokmaswas

Dengan adanya pelaksanaan konservasi kayu aking, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi berharap bisa memperbaiki kualitas wilayah pesisir di muncar yang saat ini mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya nelayan dalam mencari ikan yang masih menggunakan alat dan bahan yang bisa merusak ekosistem pesisir seperti terumbu karang serta eksploitasi hasil perikanan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi perikanan nelayan. Hasil perkembangan produksi perikanan nelayan di muncar pada tahun 2002 hingga 2011 dapat dilihat di kolom dibawah ini:

Tabel 8**Perkembangan Produksi Perikanan Muncar Tahun 2002 – 2012**

No	Tahun	Jumlah	
		Kg	Rupiah
1	2002	23.650.593	54.775.807.500
2	2003	34.058.841	60.110.214.900
3	2004	23.777.539	49.369.591.900
4	2005	11.565.876	21.885.458.600
5	2006	58.815.258	90.443.097.100
6	2007	59.884.951	82.402.023.700
7	2008	37.630.389	116.144.074.500
8	2009	48.304.370	147.948.582.400
9	2010	27.746.419	137.604.131.300
10	2011	38.328.994	326.883.033.400
11	2012	28.313.788	251.867.997.375

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi Tahun 2002 – 2012

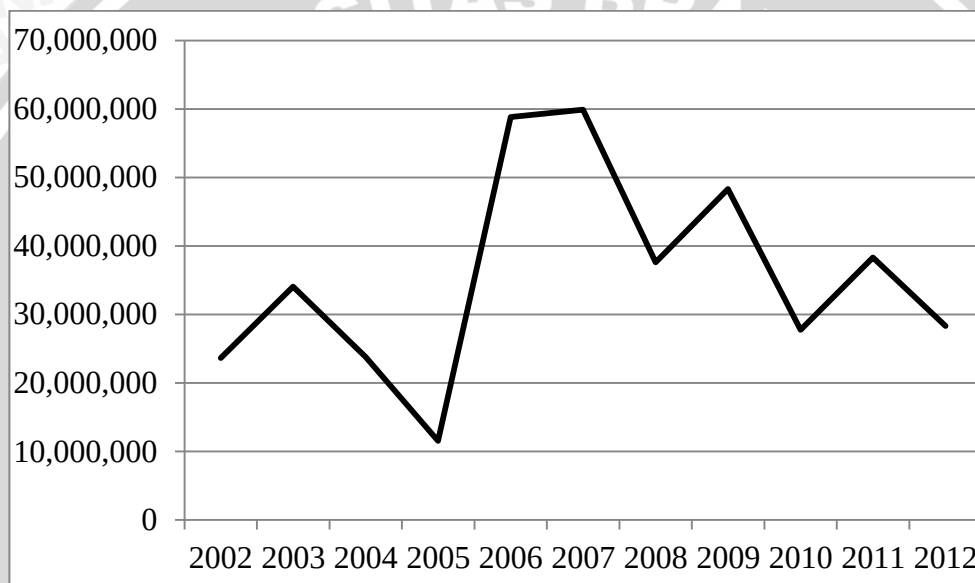
Sebelum dilakukan konservasi kayu aking, jumlah hasil produksi perikanan di Muncar pada tahun 2002 mencapai 23.650.593 kg dengan pendapatan sebesar 54.775.807.500 rupiah. Pada tahun 2003 jumlah produksi mengalami peningkatan menjadi 34.058.841 kg dengan pendapatan sebesar 60.110.214.900 rupiah. Namun pada tahun 2004 mengalami penurunan jumlah produksi yaitu sebesar 23.777.539 kg dengan pendapatan 49.369.591.900 rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh rusaknya ekosistem terumbu karang yang ada di pesisir muncar akibat kurangnya pengetahuan

dari nelayan dalam mencari ikan yang masih menggunakan bahan kimia berbahaya sehingga menyebabkan kerusakan pada terumbu karang yang menjadi tempat ikan untuk berpijah. Selain faktor kerusakan terumbu karang, masih ada faktor dari pembuangan limbah dari industri baik yang beskala kecil hingga skala besar yang langsung dibuang ke sungai maupun laut tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu sehingga menyebabkan pencemaran dan mempengaruhi kualitas perairan di pesisir Muncar. Dan juga kesadaran dari masyarakat Muncar khususnya yang bertempat tinggal di pinggir pesisir yang masih membuang sampah rumah tangga di laut. Namun seiringnya pelaksanaan konservasi kayu aking yang mulai dilakukan pada awal tahun 2003, hasil produksi perikanan di muncar mengalami turun naik. Pada tahun 2005 adalah dimana jumlah produksi perikanan di muncar mengalami penurunan yang drastis yaitu mencapai 11.565.876 kg dengan total penghasilan 21.885.458.600 rupiah. Hal ini selain dipengaruhi oleh rusaknya ekosistem terumbu karang di pesisir muncar juga dipengaruhi oleh pola pikir dari masyarakat pesisir yang masih membuang sampah di laut, masih terdapat nelayan yang melakukan pengeboman untuk mendapatkan ikan, paceklik yang mempengaruhi musim tangkap ikan akibat *global warming* serta pencemaran akibat limbah. Hasil produksi perikanan di muncar terbesar terjadi pada tahun 2007 dengan total 59.884.951 sehingga mendapatkan penghasilan sebesar 82.402.023.700 rupiah. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2007 hingga tahun 2011 merupakan masa – masa paling berat yang dihadapi oleh nelayan karena musim paceklik sehingga menyebabkan tidak menentunya jumlah hasil produksi perikanan yang didapat.

Hingga tahun 2012, hasil produksi perikanan di Muncar mencapai 28.313.788 dengan total penghasilan sebesar 251.867.997.375. Hal ini dapat dilihat dari diagram berikut:

Gambar 5

Perkembangan Produksi Perikanan Muncar Tahun 2002 – 2012



Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi Tahun 2002 – 2012

Dari diagram gambar 5 di atas dapat dilihat bahwa, selama 11 tahun produksi perikanan di Muncar mengalami naik turun yang tidak menentu. Hal ini dapat dilihat mulai tahun 2007 hingga tahun 2012 yang mengalami penurunan pada tahun 2008. Kemudian di tahun 2009 mengalami peningkatan dibawah jumlah produksi pada tahun 2007. Namun pada tahun 2010 mengalami penurunan kembali. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan namun produksi tidak mengalami peningkatan yang

signifikan sampai pada tahun 2012 mengalami penurunan jumlah produksi perikanan lagi.

a. Pelaksanaan Program Konservasi Terkait Dengan Sumber Daya Manusia dan Anggaran Daerah

Didalam pelaksanaan program kegiatan membutuhkan sumber daya yang mendukung untuk terselenggaranya kegiatan yang akan dijalankan oleh suatu pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Banyuwangi yang dibantu dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi membutuhkan sumberdaya yang memadai agar di dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan yang telah dibuat dapat tercapai dengan baik. Untuk pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking yang dilakukan di daerah selat bali khususnya di wilayah pesisir Muncar, membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki kinerja maupun pengetahuan yang baik serta adanya dukungan dana atau anggaran untuk pelaksanaan konservasi kayu aking baik yang diberikan dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari LAKIP Tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi memiliki sumberdaya manusia 54 pegawai dengan klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3 (S3) tidak ada, Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang atau proporsinya sebesar 1,8% persen dari seluruh

jumlah pegawai, Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 26 orang dengan proporsi 48,15 persen dari keseluruhan jumlah pegawai, klasifikasi D3 berjumlah 9 orang atau sebesar 16,67 persen dari jumlah pegawai, untuk klasifikasi SMA/SMK berjumlah 14 orang dengan proporsi 25,92 persen dari seluruh jumlah pegawai. Dan Klasifikasi SMP dan SD berjumlah 4 orang dengan proporsi 7,41 persen dari agregat jumlah pegawai. Komposisi jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi tergolong kurang mencukupi dengan hanya memiliki pegawai yang berstrata S2 dan S1 dengan komposisi 1 dibanding 26. Hal ini perlu penambahan dari segi sumber daya yang berkompeten khususnya yang berstrata S2. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik dari segi kinerja dan pengetahuan khususnya yang masih berstrata D3 dan S1, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi, mengirimkan seluruh pegawai secara bertahap untuk diikutkan dalam program pendidikan dan pelatihan agar nantinya dapat meningkatkan kinerja dan pengetahuan para pegawai dalam menjalankan tugas sehingga tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi bisa tercapai dengan maksimal. Di tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi mengirim 3 pegawai untuk diikutsertakan dalam program pelatihan dan diklat agar para pegawai dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9**Daftar Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2012**

No	Nama Pegawai/NIP	Jenis Diklat	Tempat Diklat	Lama
1	Untung Widiarto, SP 19610724 198203 1 006	Diklat PIM Tingkat III Angkatan CC Tahun 2012	Gedung Diklat Licin No. 01	1 bulan 17 hari
2	Suryono Bintang S, SP 19690415 198903 1 005	Diklat PIM Tingkat III Angkatan CC Tahun 2012	Gedung Diklat Licin No. 01	1 bulan 17 hari
3	Fikri Rostina, Spi 19750730 200501 2 005	Diklat PIM Tingkat IV Angkatan CDI Tahun 2012	Gedung Diklat Licin No. 01	1 bulan 5 hari

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap pegawai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan maupun diklat secara bertahap baik untuk meningkatkan jabatan maupun untuk menambah pengetahuan dari pegawai baik mengenai teknologi yang berhubungan dengan perikanan maupun skill pegawai dalam bekerja agar nantinya pegawai dapat memiliki tanggung jawab yang baik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dilakukan secara bergantian agar setiap pegawai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi memiliki skill yang seimbang atau sama dengan pegawai lainnya. Menurut Kepala Bidang Kelautan Bapak Untung Widiarto, SP mengatakan bahwa:

“Seluruh pegawai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan diupayakan untuk ahli di setiap bidangnya, sehingga kantor mengutus pegawai untuk ikut didalam pelatihan dan diklat baik yang diadakan oleh provinsi maupun oleh Pemkab”. Tahun 2012, DKP mengirim 3 pegawai untuk diikutkan dalam diklat, agar nantinya setelah selesai ikut dalam diklat bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kinerja. Dan juga setelah diklat nantinya bisa memahami teknologi yang semakin canggih saat ini yang ada hubungannya dengan perikanan sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi tanpa merusak ekosistem yang ada.

(Wawancara pada hari Rabu, 5 Maret 2014 pada pukul 09.00 WIB)

Namun untuk sumberdaya manusia yang melaksanakan kegiatan konservasi kayu aking, dilakukan oleh 7 orang dari sub bidang kelautan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi dan dibantu oleh Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi. Hal ini menyebabkan belum maksimal dalam proses pelaksanaan konservasi kayu aking sehingga menjadi faktor penghambat untuk memaksimalkan dalam pelaksanaannya.

Menurut Kepala Bidang Kelautan Bapak Untung Widiarto, SP mengatakan bahwa:

“Kalau di dalam pelaksanaan konservasi, memang kekurangan pegawai khususnya pegawai yang ada di lapangan yang terjun langsung di dalam pelaksanaan maupun pengawasan konservasi kayu aking sehingga bisa fokus dalam pelaksanaannya tidak terganggu ataupun terbebani dengan tugas yang lain, selain itu pegawai yang ada di sub bidang kelautan juga terbatas yaitu hanya 7 orang sehingga memerlukan tambahan pegawai, khususnya pegawai yang masih muda dan mampu memahami teknologi karena pegawai yang ada saat ini sudah tua dan tidak akan mungkin paham dengan perkembangan teknologi berbasis perikanan”.

(Wawancara pada hari Rabu, 5 Maret 2014 pada pukul 09.30 WIB)

Kemudian untuk anggaran dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 menyediakan dana sebesar kurang lebih 200 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10**Rincian Dana Untuk Kegiatan Konservasi Kayu Aking Tahun 2013**

No	Penggunaan	Jumlah
1	Pembuatan Tanda Batas	150.000.000
2	Pembuatan 4 Papan Pengumuman @8.000.000	32.000.000
3	Sosialisasi	2.000.000
4	Pembuatan Buku Cerita	2.000.000
5	Pembangunan Pos Informasi Kayu Aking	50.000.000

Sumber: Hasil wawancara di olah peneliti

Hal ini didukung oleh penjelasan dari Bapak Anang Budi Wasono, S.T selaku Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi sebagai berikut:

“Dana yang digunakan dalam pelaksanaan konservasi kayu aking pada tahun 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan dana kurang lebih 200 juta. Itu untuk kegiatan pelaksanaan sampai pengawasan”. Dana itu biasanya diberikan setiap ada kegiatan yang menunjang pelaksanaan konservasi kayu aking agar bisa berjalan dengan baik, contohnya tahun 2013 kemarin dana 200 juta itu dibuat untuk pembuatan papan pengumuman tentang konservasi kayu aking yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan agar nelayan bisa tahu dan paham mengenai konservasi sehingga tidak melanggar peraturan. (Wawancara pada hari Rabu, 5 Maret 2014 pada pukul 10.30 WIB)

Dana tersebut digunakan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya nelayan agar memiliki kesadaran serta tanggung jawab bersama untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan konservasi karena tujuan dari konservasi adalah untuk membangun ekosistem pesisir yang berbasis

keberlanjutan sehingga tidak terjadi kerusakan karena dengan membaiknya kualitas ekosistem pesisir, hal ini juga akan mempengaruhi sumber daya ikan yang nantinya juga akan mempengaruhi jumlah hasil produksi penangkapan ikan di Muncar di masa depan tanpa digunakannya lagi alat maupun bahan kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem pesisir lagi.

b. Komunikasi dan Koordinasi Antar Stakeholder Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Program Konservasi

Konservasi kayu aking yang dilakukan di muncar, membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik agar dalam pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan setiap stakeholder mampu memahami tugasnya masing – masing. Komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau kelompok masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungannya. Pada umumnya komunikasi terjadi secara lisan dan verbal. Komunikasi dapat terjadi jika ada persamaan antara penyampaian pesan dengan orang yang menerima pesan. Di dalam suatu komunikasi harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh seseorang maupun kelompok yang akan disampaikan informasi sehingga informasi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh seseorang maupun individu yang saling berkomunikasi. Sedangkan koordinasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik diantara kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan-kegiatan fisik maupun kegiatan-kegiatan rohaniah yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Koordinasi penting dalam organisasi - organisasi yang kompleks,

karena terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan akan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantung diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan baik, namun apabila di dalam suatu koordinasi yang dijalankan oleh kelompok maupun individu mengalami kegagalan, maka hasil yang akan di dapat akan tidak efektif dan maksimal.

Di dalam konservasi kayu aking koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi secara vertikal dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sebagai pihak pelaksana kegiatan yang dibawahnya dibantu oleh stakeholder lainnya yang ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking. Untuk komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan rapat koordinasi setiap 1 bulan sekali dengan KUB (Kelompok Usaha Bersama) untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada nelayan mengenai pentingnya menjaga ekosistem wilayah pesisir. Hal ini juga didukung oleh penjabaran yang diberikan oleh Bapak Hasan Basri selaku ketua Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas)

“Untuk rapat koordinasi pengurus dilakukan setiap 1 bulan sekali itu bisa dalam rapat maupun pertemuan yang bersifat santai dengan kelompok usaha bersama (KUB) yang ada di muncar untuk menyampaikan informasi kepada nelayan mengenai pentingnya konservasi kayu aking atau laut lindung untuk kelestarian wilayah pesisir khususnya di muncar agar sumberdaya ikan tetap terjaga”. Karena masih ada nelayan khususnya dari daerah lain yang masih menggunakan bom untuk mencari ikan tapi kalau nelayan muncar sudah

hampir 85% yang paham dan beralih menggunakan alat yang ramah lingkungan. Itu juga dari bantuan yang diberikan oleh dinas kepada nelayan. (Wawancara pada hari Selasa, 11 Maret 2014 pada pukul 10.00 WIB)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi juga melakukan koordinasi dengan daerah lain untuk pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan konservasi yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Untung Widiarto S.P, Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi:

“Dinas Kelautan dan Perikanan juga ada rapat koordinasi dengan penegak hukum yang membantu di dalam pengawasan seperti polisi, polair, pokmaswas, dan angkatan laut yang dilakukan 1 tahun sekali yaitu berupa sinkronisasi pengawasan yang dilakukan oleh Kab. Banyuwangi, Situbondo, dan Probolinggo”. Hal ini agar setiap nelayan yang ada di masing – masing daerah yang pernah ikut rapat koordinasi bisa memahami kalau di Banyuwangi khususnya di Muncar dilakukan kegiatan konservasi kayu aking. (Wawancara pada hari Senin, 24 Maret 2014 pada pukul 09.30 WIB)

Didalam rapat koordinasi tersebut biasanya membahas mengenai manfaat kegiatan konservasi kayu aking atau laut lindung untuk menjaga sumberdaya ikan dan kelestarian ekosistem wilayah pesisir dan memberikan pengetahuan kepada nelayan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya, agar kualitas dari ekosistem bisa kembali normal dengan baik ke keadaan semula dan bisa meningkatkan sumber daya ikan untuk kepentingan masyarakat.

c. Peran Masing – Masing Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Konservasi

Di dalam suatu pelaksanaan kegiatan harus jelas mengenai tugas dan peran dari setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih di dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepada setiap stakeholder yang terkait dan tidak terjadi perselisihan antar stakeholder. Untuk stakeholder yang terkait di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking terdapat 6 aktor yang terlibat yaitu mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Masyarakat Muncar khususnya nelayan, Polisi, Angkatan Laut, dan Polisi Perairan Laut, serta Pokmaswas. Setiap aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking memiliki peran atau fungsi yang berbeda sesuai dengan tugas yang diberikan. Peran dari masing – masing stakeholder yang terkait di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking adalah:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi merupakan dinas yang berfungsi sebagai pihak pelaksana utama di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking. Dinas juga memiliki peran sebagai pihak yang mengetahui langkah – langkah yang akan digunakan untuk kegiatan konservasi sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam pelaksanaan konservasi kayu aking Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi juga memiliki peran sebagai pihak yang ikut serta dalam pembuatan rumusan Perda konservasi Kayu Aking yang dilakukan di Kecamatan Muncar. Selain itu juga memiliki

peran sebagai pihak pelaksana dan pengawas jalannya kegiatan konservasi kayu aking dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang konservasi kayu aking yang dilakukan di Muncar, serta penyedia dana dalam pelaksanaan konservasi kayu aking. Hal ini didukung oleh penjelasan dari Bapak Untung Widiarto S.P, Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi:

“Peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi selain ikut di dalam perencanaan pembuatan Perda, juga memiliki peran sebagai pelaksana kegiatan yang menunjang di dalam kegiatan konservasi kayu aking seperti penanaman terumbu karang buatan dan penanaman mangrove. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas ekosistem di wilayah laut muncar agar kembali ke keadaan semula yang lebih baik lagi. Dinas juga berperan sebagai pihak yang ikut melakukan patrol pengawasan di sekitar wilayah konservasi namun dinas juga melakukan patroli pengawasan di seluruh wilayah laut Banyuwangi”.

(Wawancara pada hari Senin, 24 Maret 2014 pada pukul 10.30 WIB)

Di tahun 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking sebesar 200 juta. Selain itu juga dinas juga memiliki peran sebagai pelaksana kegiatan seperti penanaman terumbu karang buatan untuk merestorasi kembali ekosistem terumbu karang yang telah rusak di Muncar sehingga dapat kembali ke keadaan yang baik untuk tetap menjaga kualitas ekosistem pesisir di Muncar dan juga melakukan kegiatan penanaman mangrove.

2. Masyarakat Muncar khususnya nelayan

Masyarakat dalam hal ini merupakan pihak yang memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi dan ikut serta dalam menjaga lingkungan kawasan pesisir. Selain itu, nelayan juga diwajibkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan konservasi yaitu dengan cara ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi seperti penanaman terumbu karang buatan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi dan juga penanaman mangrove dipinggir pantai. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Mail salah satu nelayan di Muncar:

“Kalau nelayan peranannya itu sebagai pihak yang ikut membantu dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan penunjang untuk konservasi seperti ikut membantu menanam terumbu karang di wilayah konservasi kayu aking kemudian ikut melakukan penanaman mangrove. Dan juga nelayan memiliki tugas sebagai pemberi informasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan apabila waktu kita dalam hal ini nelayan sedang melaut dan bertemu dengan nelayan lain seperti nelayan dari daerah lain yang menggunakan alat maupun bahan yang dapat merusak lingkungan, maka nelayan akan memberikan informasi baik langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan ataupun melalui perantara Pokmaswas”.

(Wawancara pada hari Selasa, 11 Maret 2014 pada pukul 09.30 WIB)

Tidak hanya ikut serta di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, masyarakat juga memiliki fungsi dan peran sebagai informan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, apabila nantinya ketika nelayan sedang mencari ikan di laut dan menemukan atau melihat pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan lain baik nelayan dari Banyuwangi khususnya dari Muncar maupun nelayan dari daerah lain dari luar Banyuwangi di sekitar kawasan konservasi kayu aking yaitu

seperti masih menggunakan bahan dan alat yang bisa merusak ekosistem laut seperti penggunaan bom *potassium cyanida* maka nelayan diharapkan akan segera memberikan informasi yang didapat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi maupun kepada Pokmaswas untuk dilakukan tindakan lanjutan seperti pembinaan maupun penangkapan, agar nantinya mengakibatkan efek jera bagi nelayan untuk tidak lagi terjadi kegiatan yang melanggar peraturan dalam mencari ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem pesisir.

3. Kepolisian, Angkatan Laut, dan Polisi Perairan Laut

Kepolisian, Angkatan Laut, Polisi Perairan Laut memiliki peran yang sama dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking yaitu sebagai pengawas dan pengkondisian dalam pelaksanaan program konservasi kayu aking. Ke tiga stakeholder diatas juga memiliki tugas sebagai pihak yang melakukan patroli secara berkala namun tidak hanya di muncar melainkan di seluruh wilayah laut banyuwangi yang dilakukan secara berkala. Hal ini didukung oleh penjelasan dari Bapak Untung Slamet, SP selaku ketua seksi bidang pengawasan:

“Dinas Kelautan dan Perikanan juga berkoordinasi dengan stakeholder seperti Kepolisian, Angkatan Laut, dan Polisi Perairan Laut untuk proses pengawasan. Peran dari Kepolisian, Angkatan Laut, maupun Polisi Perairan Laut adalah sama yaitu sebagai pihak yang melakukan patrol pengawasan di wilayah laut Muncar tapi tidak hanya fokus di Muncar saja melainkan diseluruh wilayah laut Banyuwangi yang dilakukan secara berkala. Apabila nantinya saat melakukan patrol mereka menemukan nelayan yang melakukan

pelanggaran, maka mereka akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan dinas untuk melakukan tindakan selanjutnya sesuai dengan amanat yang ada di dalam Perda baik itu berupa denda maupun pembinaan kepada nelayan agar tidak lagi melakukan pelanggaran”. (Wawancara Selasa, 8 April 2014 pada pukul 10.00 WIB)

Apabila nantinya pada saat stakeholder seperti Kepolisian, Angkatan Laut, dan Polisi Perairan Laut melakukan patrol berkala di wilayah laut Banyuwangi khususnya di Muncar dan ada masyarakat yang menyalahi maupun melanggar aturan yang telah dibuat, maka pihak kepolisian, angkatan laut, maupun polisi perairan laut akan memberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan dan disesuaikan dengan sanksi yang telah disahkan di dalam Peraturan Daerah No. 35 Tahun 2003 tentang Konservasi Kayu Aking oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

4. Pokmaswas

Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari nelayan maupun ketua dari kelompok – kelompok nelayan yang ada di Muncar. Pokmaswas memiliki peran yang hampir sama dengan aparat berwajib (polisi, angkatan laut, maupun polisi perairan laut) yaitu sebagai pihak yang ikut mengawasi pelaksanaan konservasi kayu aking, namun pokwasmas tidak memiliki fungsi sebagai pihak yang memberikan sanksi kepada nelayan yang melanggar peraturan. Pokwasmas juga menjadi informan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi apabila ditemukan nelayan yang masih

menggunakan alat maupun bahan yang berbahaya dalam menangkap ikan akan langsung disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang nantinya juga akan berkoordinasi dengan aparat berwajib (polisi, angkatan laut, maupun polisi perairan laut) untuk melakukan penangkapan dan pembinaan bagi nelayan yang melanggar. Hal ini didukung oleh penjelasan Bapak Hasan Basri selaku Ketua Pokmaswas:

“Tugas dari Pokmaswas adalah sebagai pihak yang ikut berpartisipasi bersama dinas maupun aparat berwajib lainnya seperti polair maupun kepolisian dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah laut Banyuwangi. Hal ini dilakukan untuk menjaga wilayah laut Banyuwangi agar tidak terjadi pengerusakan ekosistem laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan alat ataupun bahan yang berbahaya. Pokmaswas juga sebagai perantara dari nelayan apabila nelayan memiliki keluhan atau permintaan bantuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan konservasi”.

(Wawancara pada hari Selasa, 11 Maret 2014 pada pukul 10.30 WIB)

Selain itu Pokmaswas juga memiliki peran sebagai pihak yang ikut melakukan patroli dan pengawasan di wilayah laut Banyuwangi khususnya di Muncar serta melakukan pengawasan di sekitar wilayah yang dijadikan konservasi kayu aking untuk melihat apakah masih ditemukan adanya nelayan yang melanggar di dalam kegiatan penangkapan ikan di laut yang masih menggunakan bahan atau alat yang berbahaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Hasil Capaian

Mengenai hasil capaian dari pelaksanaan konservasi kayu aking yang dilakukan di Muncar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang dibantu dengan stakeholder lainnya seperti nelayan, kepolisian, polair maupun pokmaswas bisa dikatakan masih belum maksimal dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hasil capaian tersebut dapat dilihat dari 3 segi yaitu lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang ada di muncar.

1. Segi Lingkungan

Hasil capaian dari pelaksanaan konservasi kayu aking dari segi lingkungan sudah dilakukan secara maksimal. Hal ini dilakukan melalui cara perbaikan ekosistem lingkungan pesisir dengan melakukan kegiatan penanaman terumbu karang buatan di lokasi konservasi kayu aking dan penanaman mangrove di daerah pinggir laut muncar. Namun untuk proses perbaikan ekosistem wilayah laut kembali ke keadaan normal, membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kegiatan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan terus – menerus secara berkala agar dengan berjalannya waktu kualitas ekosistem laut di muncar dapat kembali ke keadaan normal sehingga bisa menjadi tempat untuk berpijah bagi ikan kembali. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Untung Widiarto, SP selaku kepala bidang kelautan mengatakan bahwa:

“Dari segi lingkungan, dinas sudah melakukan kegiatan penanaman terumbu karang buatan maupun mangrove untuk memperbaiki kualitas ekosistem laut di Muncar, karena terumbu karang maupun mangrove berfungsi sebagai tempat ikan untuk berpijah sehingga nanti disana diharapkan ekosistem ikan maupun lingkungan bisa kembali ke

keadaan yang normal. Namun itu perlu waktu yang tidak sebentar untuk proses pemulihan keadaan ekosistem laut sehingga perlu adanya kegiatan secara berkelanjutan agar kembali normal ekosistemnya ”.
(Wawancara Selasa, 8 April 2014 pada pukul 10.30 WIB)

2. Segi Sosial

Hasil konservasi kayu aking dilihat dari segi sosial bisa dikatakan masih belum berjalan dengan baik, yaitu masih terkandalanya tingkat partisipasi dari masyarakat yang rendah dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat serta tanggung jawab dari masyarakat yang masih rendah membuat tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi kayu aking masih belum bisa berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukannya kegiatan sosialisasi secara bertahap yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan agar masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya pelaksanaan konservasi terhadap perbaikan ekosistem laut yang ada di Muncar sehingga apabila nantinya ekosistem laut kembali ke keadaan yang baik diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi kehidupan nelayan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Untung Widiarto, SP selaku kepala bidang kelautan mengatakan bahwa:

“Untuk kegiatan konservasi kayu aking kita masih terkendala dari segi sosial yaitu tingkat partisipasi yang masih rendah dari masyarakat sehingga belum maksimal. Padahal kegiatan ini untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan tapi nelayan masih kurang ikut serta dalam pelaksanaannya dan belum paham sepenuhnya mengenai kegiatan konservasi. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan pernah memberikan sosialisasi kepada nelayan untuk memberikan

pemahaman mengenai konservasi agar dengan adanya sosialisasi masyarakat itu paham dan mengerti tentang kegiatan konservasi sehingga diharapkan nelayan bisa ikut serta berpartisipasi bersama dinas dalam konservasi kayu aking”.

(Wawancara Selasa, 8 April 2014 pada pukul 10.30 WIB)

3. Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi, hasil capaian dari kegiatan konservasi kayu aking yang dilakukan di muncar terhadap hasil produksi perikanan nelayan masih belum bisa diperbaiki secara maksimal karena masih terkendala dari perbaikan ekosistem yang merupakan tempat ikan untuk berpijah yang membutuhkan waktu untuk kembali ke ekosistem normal dan baik sehingga hal ini saling memiliki keterkaitan antara kualitas perbaikan ekosistem perairan laut muncar terhadap hasil produksi perikanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Anang Budi Wasono, S.T selaku Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi sebagai berikut:

“Untuk ekonomi masih belum bisa maksimal karena hasil produksi tangkapan ikan nelayan saling terkait dengan kualitas ekosistem laut. Kalau ekosistem laut baik maka hasil produksi akan bisa meningkat tapi kalau ekosistemnya masih rusak maka akan memberikan pengaruh juga terhadap hasil tangkapan nelayan. Untuk itu dinas masih fokus pada pembenahan ekosistemnya agar nantinya bisa memperbaiki hasil produksi nelayan”.

(Wawancara pada hari Selasa, 8 April 2014 pada pukul 11.00 WIB)

2. Bentuk Kegiatan Dalam Implementasi Perda No.35 Tahun 2003 Tentang Konservasi Kayu Aking

a. Kegiatan dalam proses pelaksanaan konservasi kayu aking

Didalam proses pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam konservasi kayu aking meliputi penanaman terumbu karang di lokasi konservasi kayu aking, penanaman mangrove atau bakau, dan juga *restocking* benih ikan ekonomis agar nantinya sumberdaya ikan akan tetap terjaga dan ekosistem wilayah pesisir muncar mengalami perbaikan sehingga bisa memberikan manfaat bagi nelayan. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi pada tahun 2013 juga memberikan pelatihan kepada nelayan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya terumbu karang bagi ekosistem pesisir yaitu pelatihan ekosistem terumbu karang yang tertera di daftar dibawah ini:

Tabel 11

Peserta Pelatihan Ekosistem Terumbu Karang

No	Nama	Kelompok	Lamanya
1	Mail	KUB UD Jaya	3 Hari
2	Asmuni	KUB UD Jaya	3 Hari
3	Hasan Basri	Pokmaswas	3 Hari

Sumber: Hasil Dokumentasi

Hal ini didukung oleh penjelasan Bapak Hasan Basri selaku Ketua Pokmaswas:

“Kalau dari bentuk kegiatan pelaksanaan, hari ini saya bersama dengan 2 orang nelayan muncar lainnya diikutsertakan oleh dinas dalam program pelatihan ekosistem terumbu karang supaya nelayan itu bisa paham dan tahu mengenai pentingnya ekosistem terumbu karang untuk tempat berpijah ikan sehingga bisa memperbaiki hasil produksi perikanan nelayan. Pelatiha itu

dilakukan selama 3 hari di Hotel Manyar”. (Wawancara Selasa, 11 Maret 2014 pada pukul 08.30 WIB)

Di dalam pelatihan yang diberikan kepada nelayan Muncar pada tanggal 11 Maret 2014 yang dilakukan di Hotel Manyar Banyuwangi diikuti oleh perwakilan nelayan maupun kelompok nelayan dari semua kecamatan yang ada di Banyuwangi khususnya daerah yang berada di sepanjang wilayah pesisir yaitu terdiri dari 11 kecamatan seperti kecamatan Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Tegaldlimo, Siliragung dan Bangorejo. Pelatihan mengenai ekosistem terumbu karang tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada nelayan mengenai pentingnya peran dari terumbu karang sebagai tempat untuk berpijah bagi sumber daya ikan dan juga memberikan pelatihan dalam pemanfaatan terumbu karang agar dalam pemanfaatannya bisa sesuai dengan aturan tanpa melakukan eksploitasi yang berlebihan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi juga memberikan bantuan kepada nelayan yaitu berupa bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan agar nelayan tidak lagi menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem pesisir di Muncar untuk mencari ikan.

Dengan adanya bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan tanpa merusak ekosistem pesisir maka diharapkan juga mampu meningkatkan hasil produksi perikanan nelayan. Dengan pemberian bantuan alat tangkap yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi diharapkan mampu memperbaiki produksi perikanan nelayan tanpa melakukan kerusakan pada ekosistem pesisir lagi khususnya pada terumbu karang. Pada bulan Juni tahun 2013, Dinas Kelautan dan

Perikanan Kab. Banyuwangi juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada nelayan di Muncar terkait pelaksanaan konservasi kayu aking agar masyarakat mengetahui apa saja bentuk kegiatan didalam konservasi kayu aking sehingga bisa memberikan kesadaran dari nelayan agar tidak lagi menggunakan bahan kimia berbahaya dalam penangkapan ikan. Selain itu juga untuk memberikan informasi mengenai batas – batas atau wilayah dari konservasi kayu aking sehingga nelayan tidak lagi melanggar dari batas wilayah konservasi kayu aking yang dilakukan di Muncar.

b. Kegiatan dalam proses pengawasan konservasi kayu aking

Didalam proses pengawasan kegiatan konservasi kayu aking, pada mulanya pada tahun 2003 tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 2006 dan 2010 proses pengawasan mengalami perubahan sebanyak 2 kali yaitu dibentuk Waski (Pengawas Sumberdaya Perikanan) pada tahun 2006 lalu diubah menjadi Wasdal (Pengawas Sumberdaya Laut) pada tahun 2010 sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Dirjen Kelautan dan Perikanan RI. Akhirnya pada tahun 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapten Banyuwangi membentuk Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang memiliki peran sebagai pihak yang ikut melakukan kegiatan pengawasan berupa patroli pengawasan yang dilakukan secara intens baik yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan maupun stakeholder lainnya yang terkait di dalam kegiatan pengawasan. Selama proses pengawasan, Pokmaswas menjaga kualitas ekosistem wilayah pesisir muncar dari nelayan baik nelayan dari muncar maupun nelayan dari wilayah lain yang menggunakan alat maupun bahan yang dapat merusak ekosistem

wilayah pesisir dalam mencari ikan, sehingga apabila nantinya ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan, Pokmaswas akan segera memberikan informasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi untuk dilakukan tindakan lanjutan terkait pelanggaran tersebut. Data terakhir yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan sub bidang kelautan yang membawahi seksi pengawasan, pada tahun 2013 telah terjadi kegiatan ilegal yang menggunakan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Untung Slamet, SP selaku ketua seksi bidang pengawasan:

“Kegiatan rutin yang dilakukan dalam proses pengawasan adalah dengan melakukan kegiatan patroli di sepanjang wilayah laut yang ada di kawasan Kabupaten Banyuwangi, agar kegiatan yang dapat merusak ekosistem bisa dicegah sehingga tidak menimbulkan kerusakan kembali pada ekosistem laut yang ada di Banyuwangi khususnya di Muncar”.

(Wawancara Selasa, 8 April 2014 pada pukul 10.00 WIB)

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Konservasi Kayu Aking

Di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami beberapa dukungan maupun hambatan yang dihadapi. Hal ini merupakan faktor yang harus dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan konservasi kayu aking di wilayah pesisir Muncar agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu memperbaiki kualitas ekosistem pesisir dengan berwawasan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan agar sumber daya ikan yang ada di pesisir Muncar masih bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat muncar untuk

kesejahteraan mereka tanpa melakukan eksploitasi hasil sumber daya ikan yang berlebihan.

a. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung dalam kegiatan konservasi kayu aking sesuai dengan Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 yaitu:

1. Anggaran Dana

Di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking, terdapat faktor pendukung yaitu berupa anggaran dana yang cukup untuk pelaksanaan konservasi kayu aking di Muncar. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun instansi – instansi terkait. Untuk pelaksanaan konservasi kayu aking yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan disediakan anggaran untuk pelaksanaannya yaitu kurang lebih 200 juta. Hal ini didukung oleh penjelasan dari Bapak Anang Budi Wasono, S.T selaku Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi sebagai berikut:

“Untuk faktor pendukung di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking adalah sudah adanya dana yang cukup memadai baik untuk proses pelaksanaan hingga pengawasan. Dinas memberikan anggaran dana 200 juta untuk konservasi kayu aking dan dana itu digunakan untuk proses yang menunjang konservasi seperti pembuatan papan pengumuman tentang konservasi kayu aking hingga kegiatan sosialisasi kepada nelayan agar nelayan memahami dan mengetahui pentingnya pelaksanaan konservasi di wilayah laut muncar”.
(Wawancara pada hari Rabu, 5 Maret 2014 pada pukul 10.30 WIB)

Anggaran dana tersebut bisa dimaksimalkan untuk pelaksanaan konservasi kayu aking baik untuk proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan konservasi kayu aking. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan penanaman terumbu karang buatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi di wilayah pesisir Muncar agar nantinya dengan adanya program penanaman terumbu karang buatan tersebut bisa memperbaiki kualitas terumbu karang yang saat ini mengalami kerusakan hingga akhirnya bisa kembali ke keadaan normal karena pentingnya fungsi terumbu karang yaitu sebagai tempat untuk sumber daya ikan baik yang bernilai ekonomis maupun yang dilindungi berpijah serta dana tersebut juga dapat digunakan untuk kegiatan penanaman mangrove di sepanjang pesisir Muncar dan juga anggaran tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran yang dapat mendukung keberhasilan konservasi kayu aking.

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Dari Masyarakat

Di dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi mengalami beberapa hambatan, yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat khususnya nelayan mengenai pelaksanaan konservasi kayu aking. Masyarakat khususnya nelayan masih berpendidikan rendah sehingga sulit untuk mengubah pola pikir nelayan kearah yang lebih baik. Nelayan masih bersifat fanatik dalam penggunaan alat tangkap seperti bahan kimia maupun alat seperti pukat harimau dalam mencari ikan yang

menyebabkan kerusakan pada ekosistem pesisir yang ada di Muncar. Hal ini didukung oleh penjelasan Bapak Hasan Basri selaku Ketua Pokmaswas:

“Untuk faktor penghambat kegiatan konservasi salah satu yang paling utama adalah kurangnya tingkat pemahaman dan partisipasi dari masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan konservasi untuk menjaga kualitas ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa yang akan datang. Ini juga dipengaruhi dari tingkat pendidikan masyarakat nelayan yang masih rendah sehingga pola pikir masyarakat nelayan sulit untuk dilakukan perubahan yang dulunya bersifat fanatik ke bahan kimia berbahaya seperti potassium untuk mencari ikan diubah ke alat yang lebih ramah lingkungan”.
(Wawancara Selasa, 11 Maret 2014 pada pukul 11.00 WIB)

Akibat dari rusaknya ekosistem pesisir atau laut di Muncar, hal ini berakibat pada sumber daya ikan yang mengalami penurunan sehingga juga akan berakibat pada jumlah produksi perikanan nelayan. Selain kurangnya pemahaman dari nelayan, juga ada hambatan yaitu kurangnya partisipasi dari nelayan dalam pelaksanaan konservasi kayu aking yang dilakukan di wilayah pesisir muncar seperti dalam hal pelaksanaan kegiatan yaitu berupa penanaman terumbu karang buatan, penanaman mangrove, serta dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga masih ada pelanggaran dari nelayan dalam mencari ikan yaitu masuk ke wilayah yang digunakan untuk konservasi kayu aking sehingga perlunya dukungan dari masyarakat melalui kegiatan pengawasan yaitu berupa patroli secara teratur agar tidak terjadi kegiatan pelanggaran di sekitar kawasan yang dijadikan konservasi kayu aking oleh nelayan. Data terakhir yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan sub bidang kelautan yang membawahi seksi pengawasan, pada tahun 2013 telah terjadi kegiatan pelanggaran secara ilegal yang

menggunakan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan. Sesuai dengan pernyataan

Bapak Untung Slamet, SP selaku ketua seksi bidang pengawasan:

“Kalau selama tahun 2013 kemarin hanya terjadi pelanggaran sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh nelayan tapi itu nelayan dari luar Kecamatan Muncar. Mereka menggunakan bom kimia yang terbuat dari potassium cyanida, padahal kalau memakai bom akan mempengaruhi dari kualitas ikan yang ditangkap, seperti terjadi kerusakan organ ikan dan juga tekstur tubuh ikan akan lembek tidak segar lagi. Hal ini juga berpengaruh pada hasil penjualan dari ikan yang di dapat karena ikan yang diambil dari hasil pengeboman akan tidak segar lagi kualitasnya walaupun ditangkap di hari yang sama sehingga hasil penjualan akan tidak maksimal dalam pendapatan untuk nelayan”.
(Wawancara Selasa, 8 April 2014 pada pukul 10.00 WIB)

Rincian dari pelanggaran tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 12
Pelanggaran di Kec. Muncar Tahun 2013

No	Tanggal	Nama	Jenis Pelanggaran
1	1 Februari 2013	Sudarsono	Penggunaan Racun (Potassium Cyanida)
2	25 Februari 2013	Herman Surahwi Dkk	Penggunaan Racun (Potassium Cyanida)

Sumber: Hasil Dokumentasi

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh nelayan seperti yang tertera di dalam tabel, hal ini telah dilakukan tindakan penyelidikan lanjutan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan bantuan Kepolisian. Hal ini juga diperjelas oleh penjelasan dari Bapak Untung Slamet, SP selaku ketua seksi bidang pengawasan:

“Pelanggaran yang dilakukan oleh 2 nama itu, bulan februari tahun lalu sudah dilakukan proses penyelidikan oleh kepolisian Banyuwangi dan mereka ditanya apakah mereka benar tidak tahu menahu mengenai pelaksanaan

konservasi yang dilakukan di muncar atau mereka memang sengaja masih melanggar peraturan untuk tidak menggunakan alat atau bahan kimia berbahaya dalam mencari ikan. Karena sampai saat ini masih kebanyakan yang melakukan pelanggaran adalah nelayan yang dari luar muncar kalau nelayan dari muncar saya kira sudah tidak ada lagi yang menggunakan bom untuk mencari ikan karena mereka sudah merasakan akibat dari kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan menggunakan bom bisa merusak kualitas ekosistem laut khususnya terumbu karang yang merupakan tempat bagi ikan untuk berpijah sehingga berdampak pada jumlah hasil produksi mereka sendiri”.

(Wawancara Selasa, 8 April 2014 pada pukul 10.00 WIB)

Partisipasi dari masyarakat juga masih belum maksimal seperti partisipasi dalam sosialisasi konservasi kayu aking yang masih diikuti oleh sebagian nelayan serta partisipasi dalam penanaman terumbu karang maupun mangrove. Oleh karena itu perlunya sosialisasi yang intensif kepada nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi agar nelayan paham dan mengerti mengenai pentingnya konservasi untuk menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan sehingga nantinya masyarakat ataupun nelayan merasa memiliki tanggung jawab dan sadar untuk ikut serta di dalam kegiatan konservasi kayu aking baik dari mulai kegiatan pelaksanaan hingga kegiatan pengawasan konservasi kayu aking..

2. Terbatasnya sumber daya manusia dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi khususnya petugas lapangan

Di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi masih terkendala jumlah SDM yang ada di dinas dan juga SDM yang bertugas di lapangan yang secara langsung mengawasi jalannya kegiatan konservasi kayu aking sehingga terkadang masih banyak terjadinya pelanggaran di

sekitar kawasan konservasi kayu aking yang dilakukan oleh nelayan akibat dari kurangnya pengawasan. Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 memiliki total sumber daya manusia atau pegawai berjumlah 54 orang dengan klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3 (S3) tidak ada. Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang atau proporsinya sebesar 1,8% persen dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 26 orang dengan proporsi 48,15 persen dari keseluruhan jumlah pegawai, klasifikasi D3 berjumlah 9 orang atau sebesar 16,67 persen dari jumlah pegawai, untuk klasifikasi SMA/SMK berjumlah 14 orang dengan proporsi 25,92 persen dari seluruh jumlah pegawai. Dan klasifikasi SMP dan SD berjumlah 4 orang dengan proporsi 7,41 persen dari agregat jumlah pegawai. Namun untuk pegawai yang menjalankan kegiatan konservasi kayu aking diserahkan pada sub bidang kelautan yang di dalamnya memiliki sumber daya manusia atau pegawai berjumlah 7 orang sehingga perlunya penambahan sumber daya manusia agar dalam pelaksanaan kegiatan konservasi dapat fokus dan berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini didukung oleh penjelasan dari Bapak Anang Budi Wasono, S.T selaku Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi sebagai berikut:

“Dinas masih kekurangan jumlah SDM baik yang ada di dinas maupun SDM yang berada di lapangan yang fokus melakukan pelaksanaan konservasi hingga pengawasan kegiatan konservasi. Sekarang saja di sub bidang kelautan hanya punya 7 orang pegawai yang memiliki tugasnya masing – masing sehingga mungkin tidak bisa fokus hanya kepada kegiatan konservasi. Untuk itu dinas perlu menambah SDM khususnya yang berada di lapangan sehingga pelaksanaan konservasi bisa berjalan secara maksimal sehingga tujuan dari kegiatan konservasi bisa berjalan dengan baik demi memberikan manfaat dan

kesejahteraan bagi masyarakat di Muncar”. (Wawancara pada hari Rabu, 5 Maret 2014 pada pukul 10.30 WIB)

Untuk itu diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia yang kompeten khususnya yang memahami mengenai konservasi agar di dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kegiatan konservasi yang dilakukan di Muncar bisa memberikan manfaat baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi masyarakat. Dan juga dibutuhkan pelatihan maupun diklat bagi sumber daya manusia dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi khususnya mengenai konservasi agar nantinya pengetahuan yang didapat selama ikut dalam pelatihan maupun diklat bisa dipraktekkan maupun dilakukan di dalam konservasi kayu aking yang dilakukan di Muncar agar hasil yang dicapai dari kegiatan konservasi kayu aking bisa maksimal.

C. Analisis Data Penelitian

1. Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 Tentang Konservasi Kayu Aking

Proses sebuah kebijakan publik melewati beberapa tahap yaitu, perumusan kebijakan (formulasi), pelaksanaan kebijakan (implementasi), dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan pada proses implementasi kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan program konservasi kayu aking. Berkaitan dengan implementasi kebijakan, Abdul Wahab (2005:59) menyampaikan bahwa:

“Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran – saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking yang dilakukan di wilayah pesisir Kec. Muncar belum cukup baik atau belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Disini akan dianalisis setiap poin yang berhubungan dengan Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang Konservasi Kayu Aking. Konservasi menurut IUCN adalah pengelolaan penggunaan manusia atas biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan terbesar pada generasi sekarang, sementara memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masa depan. Konservasi dalam definisi ini mencakup pelestarian, pemeliharaan, pemanfaatan berkelanjutan, pemulihan dan peningkatan mutu lingkungan alamiah.

Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumber daya yang ada bagi masa depan. Berbagai permasalahan dan bentuk ancaman yang sangat serius terhadap sektor perikanan dan kelautan, yang terkait dengan kelestarian sumberdaya hayati laut sebagai masalah utama dalam pengelolaan dan pengembangan konservasi perairan antara lain: adanya pemanfaatan berlebih (*over exploitation*) di beberapa wilayah terhadap sumber daya hayati pesisir dan laut, penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan, perubahan dan degradasi fisik habitat, pencemaran, introduksi spesies asing, konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya, dan perubahan iklim global serta bencana alam upaya-upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat telah dilakukan guna pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kawasan konservasi perairan dapat dijadikan sebagai salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif, yaitu melalui pengalokasian sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik, kondisi ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, akan berdampak pada peningkatan sumberdaya ikan di wilayah sekitarnya yang merupakan areal penting penangkapan bagi masyarakat pesisir, sehingga dampak konservasi kawasan perairan akan mendukung kegiatan perikanan

secara langsung, maupun berbagai pemanfaatan kawasan konservasi yang dikelola berdasarkan sistem zonasi untuk berbagai kepentingan seperti pariwisata bahari yang pada akhirnya mampu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir .

Agar supaya ekosistem dan sumberdaya dapat berperan secara optimal dan berkelanjutan maka diperlukan upaya –upaya perlindungan dari berbagai ancaman degradasi yang dapat ditimbulkan dari berbagai aktivitas pemanfaatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konsep perencanaan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 34 tahun 2002, bahwa wilayah pesisir yang sangat dinamik tapi rentan terhadap perubahan yang terjadi, harus dibagi ke dalam beberapa zonasi pengelolaan. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1990 tujuan dari kawasan konservasi adalah untuk mendapatkan bentuk penataan ruang dan arah pengelolaan kawasan konservasi yang optimal sehingga dapat meningkatkan fungsi dari kawasan lindung itu sendiri serta untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. Konservasi juga berhubungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah “upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

a. Pelaksanaan Program Konservasi Terkait Sumber Daya Manusia dan Anggaran Daerah

Keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial atau anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan implementasi kebijakan menjadi perhitungan penting dalam mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (1978: 1986) dalam Wahab, Abdul (2005:70-81) yaitu mengenai model implementasi kebijakan "*the top down approach*" harus memenuhi beberapa syarat – syarat seperti: 1. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber – sumber yang cukup memadai, 2. Perpaduan sumber – sumber yang dilakukan benar – benar tersedia, dan 3. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan konservasi kayu aking, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi memiliki total sumberdaya manusia 54 orang dengan komposisi pegawai klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3 (S3) tidak ada. Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang atau proporsinya sebesar 1,8% persen dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai

yakni sebanyak 26 orang dengan proporsi 48,15 persen dari keseluruhan jumlah pegawai, klasifikasi D3 berjumlah 9 orang atau sebesar 16,67 persen dari jumlah pegawai, untuk klasifikasi SMA/SMK berjumlah 14 orang dengan proporsi 25,92 persen dari seluruh jumlah pegawai. Dan Klasifikasi SMP dan SD berjumlah 4 orang dengan proporsi 7,41 persen dari agregat jumlah pegawai. Namun untuk sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan konsevasi kayu aking, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya memiliki 7 sumberdaya manusia yaitu di sub bidang kelautan saja karena sub bidang kelautan merupakan bidang dimana yang di serahkan tanggung jawab untuk menjalankan pelaksanaan konservasi kayu aking. Guna untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas secara optimal, perlu penambahan personil sumberdaya manusia atau pegawai khususnya yang ditempatkan di lapangan yang bertugas secara langsung mengawasi pelaksanaan konservasi kayu aking. Hingga saat ini sumberdaya manusia yang bertugas langsung dilapangan untuk mengawasi pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan konservasi kayu aking masih belum ada.

Disamping itu kualitas dari sumberdaya manusia juga perlu mendapatkan porsi melalui pelaksanaan diklat atau pelatihan untuk meningkatkan potensi dan pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal tanpa mengalami kendala. Selanjutnya untuk mengenai sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan sumber daya manusia. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu

kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari atas dana atau anggaran lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau anggaran merupakan sumbangan besar terhadap kegagalan dari suatu implementasi kebijakan. Sementara pada kegiatan konservasi kayu aking dari segi anggaran dianggap sudah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking. Pada tahun 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi mengalokasikan dana kurang lebih 200 juta untuk pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking. Dana tersebut digunakan untuk pembuatan batas wilayah konservasi kayu aking, pelaksanaan sosialisasi kepada nelayan, pembuatan papan reklame untuk pengumuman, serta pembangunan pos informasi kayu aking.

b. Komunikasi dan Koordinasi Antar Stakeholder Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Program Konservasi

Di dalam suatu pelaksanaan implementasi kebijakan, komunikasi dan koordinasi memiliki peran dan fungsi yang besar untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan yang dijalankan oleh suatu organisasi. Komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau kelompok masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungannya. Pada umumnya komunikasi terjadi secara lisan dan verbal. Komunikasi dapat terjadi jika ada persamaan antara penyampaian pesan dengan orang yang menerima pesan. Di dalam suatu komunikasi harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh seseorang maupun

kelompok yang akan disampaikan informasi sehingga informasi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh seseorang maupun individu yang saling berkomunikasi. Sedangkan koordinasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik diantara kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan-kegiatan fisik maupun kegiatan-kegiatan rohaniah yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Koordinasi penting dalam organisasi - organisasi yang kompleks, karena terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan akan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantung diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan baik, namun apabila di dalam suatu koordinasi yang dijalankan oleh kelompok maupun individu mengalami kegagalan, maka hasil yang akan di dapat akan tidak efektif dan maksimal. Dalam pelaksanaan konservasi kayu aking, terdapat 6 aktor atau stekholder yang terlibat diantaranya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi, masyarakat dalam hal ini nelayan, Polisi, Angkatan Laut, Polisi Perairan Laut, dan Pokmaswas. Peran yang dilakukan setiap stakeholder pada intinya adalah memberikan koordinasi, pengarahan, mensinkronasikan kepentingan dua pihak atau lebih yang terkait dan menyatukan tujuan antara pihak-pihak tersebut. Dalam praktek yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, peran yang dilakukan menemukan gap antara teori dengan praktek sehingga temuan gap yang terjadi antara teori dan praktek adalah sebagai berikut.

Menurut Hasibuan (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu: Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Jika dikaitkan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banyuwangi, koordinasi yang dilakukan di dalam organisasi maupun dengan nelayan dan Pokmaswas yaitu secara koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal ini bersifat *Top-Down Approach* dari pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan ke bidang-bidang yang ada di dinas hingga koordinasi dengan nelayan dan Pokmaswas. Pada setiap bidang memiliki kepala bidang, selanjutnya terdapat kepala sub bidang dan staf-staf. Arah koordinasi di Dinas Kelautan dan Perikanan ini adalah secara vertikal apabila ada wewenang pimpinan yang mengkoordinasikan kegiatan internal organisasi, yaitu dari pimpinan kemudian yang terakhir adalah para staf yang menerima koordinasi secara vertikal dari pimpinan dinas kelautan dan perikanan. Namun di dalam koordinasi vertikal ini seringkali terjadi hambatan antara Kepala Bidang dengan Kasubidnya maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan nelayan dan Pokmaswas, terkait komunikasi yang kurang lancar antara kedua pihak dan kesalahan komunikasi di dalam menangkap tugas. Khususnya di dalam koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan nelayan mengalami problem atau masalah yaitu nelayan menganggap dengan adanya kegiatan konservasi kayu aking akan mengurangi wilayah penangkapan dari nelayan.

Sementara itu untuk koordinasi dengan stakeholder lainnya khususnya organisasi yang berbentuk instansi, dilakukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat dalam hal yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi dengan pihak Kepolisian, Angkatan Laut, dan Polisi Perairan Laut. Namun untuk kedepannya diperlukan koordinasi dan sinergitas yang kuat antara stakeholder yang ada di dalam kegiatan konservasi kayu aking agar di dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking tidak lagi terkendala dari proses koordinasi maupun komunikasi antar stakeholder yang terkait. Hal ini penting karena kinerja suatu implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kecocokan dengan para agen – agen atau stakeholder lain di dalam pelaksanaannya.

c. Peran Masing – Masing Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Konservasi

Di dalam suatu pelaksanaan kebijakan, pasti terdapat beberapa stakeholder yang terlibat di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik demi terlaksananya pelaksanaan kebijakan yang baik dan berhasil. Untuk stakeholder yang terkait di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking terdapat 6 aktor yang terlibat yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Banyuwangi, Masyarakat Muncar khususnya nelayan, Polisi, Angkatan Laut, dan Polisi Perairan Laut, dan Pokmaswas. Setiap aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking memiliki peran atau fungsi yang berbeda. Peran atau fungsi merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Untuk itu diperlukannya pembagian peran yang harus dipahami oleh masing – masing stakeholder yang terkait agar nantinya tidak terjadi salah paham dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking dan tidak terjadi perbedaan tanggung jawab dengan membebaskan porsi kerja yang berbeda pada setiap stakeholder yang terlibat. Karena pembagian peran yang dilakukan di dalam suatu kegiatan dengan baik akan mempengaruhi tingkat keberhasilan di dalam kegiatan yang dijalankan sehingga tujuan yang dibuat dapat tercapai dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan sekitar.

d. Hasil Capaian

Hasil capaian dari pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi untuk memperbaiki kualitas ekosistem perairan laut di Muncar melalui kegiatan konservasi kayu aking

bisa dikatakan secara teknis sudah maksimal namun dari berbagai segi masih belum maksimal.

1. Segi Lingkungan

Dari segi lingkungan, proses perbaikan ekosistem laut membutuhkan waktu yang tidak sebentar hingga kembali ke keadaan normal. Untuk itu diperlukan tindakan – tindakan yang dapat memperbaiki ekosistem laut. Hal ini bisa dilakukan melalui penanaman terumbu karang buatan dan penanaman mangrove secara berkelanjutan agar kualitas ekosistem dapat kembali normal dan apabila ekosistem sudah kembali normal akan dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagai nelayan.

2. Segi Sosial

Dari segi sosial yaitu partisipasi masyarakat masih kurang berhasil untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam konservasi kayu aking. Menurut Supriharyono (2007), peningkatan kesadaran masyarakat ditujukan untuk meyakinkan kepada masyarakat pantai khususnya nelayan akan manfaat jangka panjang dari perlindungan kawasan yaitu manfaat berkelanjutan yang dihasilkan oleh usaha perlindungan kawasan. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus dilibatkan pada identifikasi, perancangan dan pelaksanaan berbagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari usaha perlindungan kawasan konservasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 pasal 46 ayat 1 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, bahwa untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya ikan dilakukan dengan pembinaan masyarakat. Dari segi lingkungan, pelaksanaan konservasi kayu aking memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah:

“Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Namun untuk keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari segi lingkungan melalui konservasi kayu aking memerlukan waktu yang tidak sedikit dan harus dilakukan secara terus – menerus dan berkala, sehingga pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui konservasi bisa berhasil secara maksimal dan mengembalikan kualitas ekosistem yang baik seperti semula untuk dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi nelayan di masa yang akan mendatang.

3. Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi, masih belum bisa maksimal karena masih terkendala dari kualitas ekosistem laut yang membutuhkan waktu untuk bisa kembali ke keadaan yang normal sehingga hal ini juga terkait dengan kualitas sumber daya perikanan yang tersedia. Untuk itu diperlukan pembenahan ekosistem

laut secara serius dan nantinya akan berkaitan dengan hasil sumber daya ikan yang ada bagi perekonomian dan kesejahteraan hidup nelayan.

2. Bentuk Kegiatan Dalam Implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 Tentang Konservasi Kayu Aking

a. Kegiatan dalam proses pelaksanaan konservasi kayu aking

Dalam suatu kebijakan, proses pelaksanaan merupakan salah satu proses yang melihat apakah sebuah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik. Dari temuan peneliti mengenai bentuk pelaksanaan dalam kegiatan konservasi kayu aking masih terkendala dari tingkat partisipasi yang dilakukan oleh nelayan yaitu tingkat partisipasi nelayan masih kecil. Padahal partisipasi nelayan dalam kegiatan konservasi kayu aking merupakan salah satu pendukung di dalam pelaksanaan konservasi agar dapat berjalan dengan baik. Namun dilapangan, pada awal pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking masih sedikit masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman dan kemauan untuk ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking dan banyak masyarakat dalam hal ini nelayan tidak setuju dengan adanya wilayah yang dijadikan konservasi kayu aking. Mereka menganggap dengan adanya wilayah konservasi kayu aking, hal ini akan mengurangi wilayah dari tangkapan nelayan.

Menurut Slamet (1994) dalam Fahrudin (2005:44) partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi faktor – faktor yang mendukungnya, yaitu:

1. Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut.
3. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu atau sarana dan material lainnya.

Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan. Manusia yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, seperti psikologis individu (*needs*, harapan, motif, *reward*), pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi, kelembagaan yang mendukung, struktur dan stratifikasi sosial, budaya local serta peraturan dan pelayanan pemerintah.

b. Kegiatan dalam proses pengawasan konservasi kayu aking

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan perlu adanya proses pengawasan atau monitoring. Proses pengawasan atau monitoring merupakan kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditentukan sebelumnya sehingga tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan maksimal. Pengawasan perlu dilakukan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan dilapangan telah sesuai dengan harapan yang ingin dicapai atau masih perlu adanya perubahan sehingga akan diketahui kegiatan yang dijalankan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Untuk itu diperlukan kegiatan pengawasan yang berjalan secara intensif dan juga adanya sumber daya manusia yang memahami dari proses pengawasan, sehingga nantinya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan, SDM yang bertugas sebagai pengawas dapat memberikan informasi kepada nelayan yang melanggar sehingga nelayan paham dan mengerti tentang kawasan yang digunakan sebagai wilayah konservasi agar seiring berjalannya waktu tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi dari stakeholder yang melaksanakan konservasi kayu aking. Namun dukungan dari stakeholder lainnya tetap dibutuhkan agar proses pengawasan yang dijalankan dapat dilakukan dengan baik sehingga kualitas ekosistem wilayah pesisir khususnya di Muncar yang merupakan pusat perikanan di Kabupaten Banyuwangi tetap terjaga secara berlanjut untuk bisa memberikan manfaat dibidang perekonomian baik bagi nelayan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan dan juga untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi yang bersumber dari bidang kelautan dan perikanan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Konservasi Kayu Aking

a. Faktor Pendukung

1. Anggaran Dana

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan konservasi salah satunya adalah adanya anggaran dana yang cukup. Hal ini merupakan faktor pendukung agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya anggaran dana yang mencukupi, maka kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi tidak akan berjalan dengan lancar dan baik, sehingga untuk mencapai tujuan dari kegiatan konservasi tidak akan tercapai dengan maksimal. Anggaran dana yang cukup juga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang dapat menunjang dari pelaksanaan konservasi kayu aking di wilayah pesisir Muncar. Dalam hal pelaksanaan konservasi kayu aking, anggaran dana yang disediakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi sejumlah 200 juta untuk pemenuhan kebutuhan mulai dari kegiatan pelaksanaan seperti sosialisasi hingga kegiatan pengawasan di dalam konservasi. Untuk itu, faktor anggaran dana yang cukup merupakan pendukung agar suatu kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Dari Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela, tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan oleh Sastropoetro (1998) dalam Fahrudin (2005:37) bahwa partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Namun di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi di Muncar masih terkendala dari kecilnya tingkat partisipasi yang dilakukan oleh nelayan. Dan juga masih ada nelayan yang masih belum mengerti tentang konservasi yang dijalankan di wilayah pesisir muncar sehingga terkadang masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan.

Padahal untuk mensukseskan pelaksanaan suatu kegiatan, membutuhkan partisipasi dari masyarakat tanpa adanya paksaan sehingga masyarakat akan merasa dirinya memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kualitas ekosistem wilayah pesisir yang ada di sekitarnya. Untuk itu diperlukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif baik yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi maupun stakeholder lainnya yang terkait di dalam pelaksanaan konservasi sehingga masyarakat akan tergerak untuk ikut di dalam kegiatan konservasi dan memiliki pengetahuan baru mengenai pentingnya wilayah konservasi untuk membangun wilayah pesisir yang berkelanjutan.

2. Terbatasnya sumber daya manusia dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Banyuwangi khususnya petugas lapangan

Faktor penghambat di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking selain dari kurangnya pemahaman dan partisipasi dari masyarakat yang masih bersifat fanatik pada alat maupun bahan yang biasa nelayan gunakan dalam mencari ikan. Selain itu juga dipengaruhi dari faktor terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang menjalankan tugas dalam konservasi kayu aking serta penempatan posisi kerja yang tidak sesuai dengan keilmuan yang didapat selama pendidikan sarjana (S1) sehingga masih banyak hambatan dalam menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan kepada pegawai. Dan juga masih kurangnya sumber daya manusia yang bekerja di lapangan khususnya yang secara langsung mengawasi kegiatan konservasi kayu aking. Dari beberapa faktor penghambat diatas menunjukkan bahwa dalam proses pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi masih terdapat kendala – kendala yang dihadapi sehingga perlu adanya perbaikan dari segi keilmuan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi melalui kegiatan pelatihan yang memberikan pengetahuan mengenai konservasi maupun diklat yang memberikan informasi mengenai teknologi apa saja yang cocok untuk kegiatan penangkapan namun ramah lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem pesisir baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah

maupun pemerintah pusat sehingga sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi nantinya dalam menjalankan kegiatan konservasi kayu aking dapat maksimal sesuai dengan tujuan yang terdapat pada isi Perda No. 35 Tahun 2003 dan bisa memberikan manfaat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan masyarakat melalui kegiatan konservasi kayu aking.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan dari bab I sampai dengan bab IV dapat disimpulkan mengenai implementasi Perda No. 35 Tahun 2003 tentang konservasi kayu aking di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking yang dilakukan di daerah selat bali khususnya di wilayah pesisir Muncar, membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki kinerja maupun pengetahuan yang baik mengenai kegiatan konservasi serta adanya dukungan dana atau anggaran untuk pelaksanaan konservasi kayu aking baik yang diberikan dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Di dalam konservasi juga membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik agar dalam pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan setiap stakeholder mampu memahami tugasnya masing – masing. Di dalam konservasi kayu aking koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi secara vertikal dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sebagai pihak pelaksana kegiatan yang dibawahnya dibantu oleh stakeholder lainnya yang ikut membantu dalam

pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking. Untuk komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan rapat koordinasi setiap 1 bulan sekali dengan KUB (Kelompok Usaha Bersama) untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada nelayan mengenai pentingnya menjaga ekosistem wilayah pesisir. Stakeholder yang terkait di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Masyarakat Muncar khususnya nelayan, Polisi, Angkatan Laut, dan Polisi Perairan Laut, serta Pokmaswas. Untuk hasil capain dari kegiatan konservasi kayu aking adalah:

- a. Dari segi lingkungan sudah dilakukan secara maksimal. Hal ini dilakukan melalui cara perbaikan ekosistem lingkungan pesisir dengan melakukan kegiatan penanaman terumbu karang buatan di lokasi konservasi kayu aking dan penanaman mangrove di daerah pinggir laut muncar. Namun untuk proses perbaikan ekosistem wilayah laut kembali ke keadaan normal, membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kegiatan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan terus – menerus secara berkala agar dengan berjalannya waktu kualitas ekosistem laut di muncar dapat kembali ke keadaan normal sehingga bisa menjadi tempat untuk berpijah bagi ikan kembali.

b. Dari segi sosial bisa dikatakan masih belum berjalan dengan baik, yaitu masih terkandanya tingkat partisipasi dari masyarakat yang rendah dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat serta tanggung jawab dari masyarakat yang masih rendah membuat tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi kayu aking masih belum bisa berjalan dengan baik.

c. Dari segi ekonomi, hasil capaian dari kegiatan konservasi kayu aking yang dilakukan di muncar terhadap hasil produksi perikanan nelayan masih belum bisa diperbaiki secara maksimal karena masih terkendala dari perbaikan ekosistem yang merupakan tempat ikan untuk berpijah yang membutuhkan waktu untuk kembali ke ekosistem normal dan baik sehingga hal ini saling memiliki keterkaitan antara kualitas perbaikan ekosistem perairan laut muncar terhadap hasil produksi perikanan masyarakat.

b. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan konservasi kayu aking yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi seperti penanaman terumbu karang buatan, penanaman mangrove atau bakau, dan juga restocking benih ikan ekonomis sehingga dapat mengembalikan potensi perikanan yang ada di wilayah laut Banyuwangi. Selain itu dalam kegiatan pengawasan, bentuk kegiatan yang

dilakukan berupa patroli pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan Pokmaswas serta nelayan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara teratur bertujuan untuk mengurangi pelanggaran di sekitar kawasan laut Banyuwangi khususnya di kawasan yang dijadikan konservasi kayu aking dari kegiatan yang tidak ramah lingkungan yang dapat merusak kualitas ekosistem laut.

c. Di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking juga mengalami faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu:

a. Faktor pendukung

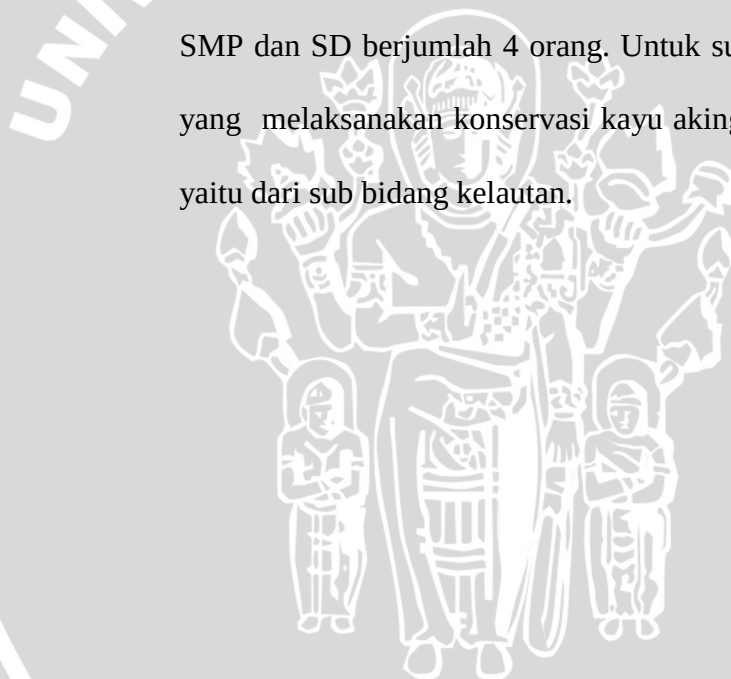
1) Sudah tersedianya anggaran dana yang cukup untuk pelaksanaan konservasi kayu aking di Muncar. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun instansi – instansi terkait. Untuk pelaksanaan konservasi kayu aking yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan disediakan anggaran untuk pelaksanaannya yaitu kurang lebih 200 juta. Anggaran dana tersebut bisa dimaksimalkan untuk pelaksanaan konservasi kayu aking baik untuk proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang mendukung konservasi kayu aking.

Namun didalam kegiatan konservasi kayu aking juga mengalami beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

a. Faktor penghambat

- 1) Kurangnya pemahaman dari masyarakat khususnya dari nelayan mengenai pelaksanaan konservasi kayu aking. Masyarakat khususnya nelayan masih berpendidikan rendah sehingga sulit untuk mengubah pola pikir dari nelayan kearah yang lebih baik. Nelayan masih bersifat fanatik dalam penggunaan alat tangkap seperti bahan kimia maupun alat seperti pukot harimau dalam mencari ikan yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem pesisir yang ada di Muncar. Selain itu masih belum maksimalnya tingkat partisipasi dari masyarakat dalam sosialisasi mengenai kegiatan konservai kayu aking yang masih diikuti oleh sebagian nelayan serta partisipasi dalam proses pelaksanaan maupun proses pengawasan seperti di dalam kegiatan penanaman terumbu karang maupun mangrove serta kegiatan patroli rutin yang diadakan baik oleh Pokmaswas maupun stakeholder lainnya yang terkait dalam kegiatan konservasi kayu aking.

- 2) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang hanya memiliki sumber daya manusia pada tahun 2012 sejumlah 54 orang dengan klasifikasi Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang, Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 26 orang, D3 berjumlah 9 orang, untuk klasifikasi SMA/SMK berjumlah 14 orang, serta klasifikasi SMP dan SD berjumlah 4 orang. Untuk sumber daya manusia yang melaksanakan konservasi kayu aking berjumlah 7 orang yaitu dari sub bidang kelautan.



2. Saran

- a. Untuk anggaran dana yang digunakan dalam pelaksanaan konservasi kayu aking diharapkan mampu dipertahankan ataupun ditingkatkan sehingga pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking bisa maksimal lagi dan juga perlu penambahan sumber daya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan konservasi yang akan datang bisa mencapai tujuan yang ada pada Perda No. 35 Tahun 2003 dan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta mampu meningkatkan hasil produksi perikanan di Muncar. Selain itu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan perlu diikutkan dalam kegiatan diklat maupun pelatihan yang berhubungan dengan konservasi sehingga SDM yang dimiliki oleh dinas bisa memiliki pengetahuan mengenai konservasi maupun teknologi yang dapat digunakan untuk mensukseskan kegiatan konservasi tersebut. Untuk komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder yang terkait di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking dapat dilakukan secara intensif agar di dalam pelaksanaan konservasi kayu aking dapat berjalan dengan baik dan efektif karena masing – masing stakeholder yang terkait sudah memahami apa tugasnya sendiri – sendiri sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar stakeholder lainnya. Dinas juga bisa berkoordinasi dengan pihak swasta seperti pemilik industri yang ada di Muncar seperti dari segi anggran dana untuk konservasi kayu aking tersebut karena

industri juga ikut serta menikmati potensi perikanan dan kelautan yang ada di Muncar. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi juga bisa melakukan kerjasama maupun koordinasi dan komunikasi dengan pihak – pihak akademisi seperti pakar maupun universitas khususnya dari fakultas perikanan dan kelautan yang memahami tentang konsep konservasi agar memperoleh pengetahuan lebih mengenai konsep konservasi maupun teknologi yang menunjang kegiatan konservasi sehingga di dalam pelaksanaannya nanti konservasi bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan kesejahteraan bagi nelayan dan hasil yang dicapai dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi bisa maksimal.

- b. Untuk mensukseskan kegiatan konservasi kayu aking yang dilakukan di Muncar, Dinas Kelautan dan Perikanan dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatannya baik dalam proses pelaksanaan seperti dalam hal penanaman terumbu karang buatan maupun kegiatan sosialisasi kepada nelayan agar nelayan memiliki pengetahuan mengenai pentingnya konservasi yang berkelanjutan untuk menjaga ekosistem pesisir dan potensi perikanan bagi kesejahteraan masyarakat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sedangkan untuk kegiatan pengawasan juga dapat ditingkatkan kembali agar masyarakat yang masih melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara – cara ataupun dengan alat yang tidak ramah lingkungan

bisa dijadikan efek jerah bagi nelayan agar tidak lagi melakukan pelanggaran

- c. Untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dari masyarakat khususnya nelayan di dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi bisa melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan secara intensif dan terus - menerus agar dengan adanya kegiatan sosialisasi yang intensif dan terus - menerus, nelayan mampu memahami dan memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut serta dalam menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir muncar melalui kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Dan juga dengan adanya sosialisasi, nelayan akan mendapatkan pengetahuan baru tentang konsep dari konservasi sehingga nantinya dalam pelaksanaan kegiatan konservasi, nelayan sudah memahami apa saja yang harus dilakukan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan konservasi dan apa saja kegiatan – kegiatan yang dilarang di daerah kawasan konservasi. Selain itu juga perlu adanya penambahan sumber daya manusia dari Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya di sub bidang kelautan yang memiliki tugas sebagai pelaksana kegiatan konservasi kayu aking

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Anggoro, S., 2000. *Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Berwawasan Lingkungan*. Seminar Nasional Fakultas Teknik dalam rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro ke 43. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2012. *Statistik Kecamatan Muncar Dalam Angka 2013*. Banyuwangi
- Budiamanta, Arif. 2005. *Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Elex Media Kompetindo
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2012. *Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi
- Fahrudin, A. 2005. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaira
- Hasibuan, Malayu S. P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Haji Masagung
- Islamy, M.I. 2000. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jimung, M. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muluk, M.R.K. 2005. *Desentralisasi & Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing

Muluk, M.R.K. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Lembaga Penerbitan & Dokumen FIA UNIBRAW dan Bayumedia Publishing

Mustopadijaja, A.R. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang *Konservasi Sumber Daya Ikan*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.17/Men/2008 tentang *Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*

Sarifuddin dan Retno Susanti. 2011. *Penilaian Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Permukiman Berkelanjutan di Kelurahan Terboyo Wetan Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro

Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Supriharyono. 2002. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sutisna, Endang. 2006. *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil*.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Widodo, MS Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/informasi-konservasi/75-targetkonservasi>
(Diakses tanggal 17 November 2013)

<http://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html>_(Diakses tanggal 17 November 2013)

LAMPIRAN

Hasil Dokumentasi Penelitian



Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Banyuwangi



Tanda Pengumuman Wilayah
Konservasi Kayu Aking



Tanda Batas Wilayah Konservasi
Kayu Aking



Pelaksanaan Sosialisasi Konservasi
Kayu Aking



Stakeholder dalam Konservasi
Kayu Aking



Kerjasama Dinas dengan Pokmaswas
Untuk Konservasi Kayu Aking



Kedaaan Ikan Akibat Penggunaan
Bom Potassium Cyanida

Panduan Wawancara

1. Gambaran umum konservasi kayu aking?
2. Alasan utama pelaksanaan konservasi kayu aking?
3. Kapan pelaksanaan konservasi kayu aking dimulai?
4. Tujuan dan sasaran dari pelaksanaan konservasi kayu aking?
5. Kegiatan yang dilakukan dalam konservasi kayu aking?
6. Siapa saja stakeholder yang terkait dalam konservasi kayu aking?
7. Tugas dan peran masing – masing stakeholder?
8. Bagaimana koordinasi dan komunikasi antar stakeholder?
9. Kebutuhan SDM dan anggaran dalam konservasi kayu aking?
10. Apa saja faktor pendukung dalam konservasi kayu aking?
11. Apa saja faktor penghambat dalam konservasi kayu aking?
12. Bagaimana hasil yang dicapai saat ini setelah dilakukan konservasi kayu aking?



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 106 Telepon (0333) 421418 Fax (0333) 421418
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : disperikanan@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 523/618/ 429.113/ 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : FANDI ADITYA FIANDA
NIM : 105030100111074
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat : Jl. Mojopahit No.26, Kelurahan Taman Baru,
Banyuwangi

Bahwa nama tersebut adalah benar-benar telah melakukan penelitian untuk keperluan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSERVASI WILAYAH PESISIR YANG BERKELANJUTAN (Studi Perda No.35 Tahun 2003 Tentang Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)" mulai tanggal 3 Maret 2014 s/d 12 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 10 April 2014
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Banyuwangi.



Ir. PUDJO HARTANTO, M.AP

Pemula Tingkat I

NIP. 19631213 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 03 Maret 2014

Nomor : 072/172 /REKOM/429.204/2014
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Riset / Survey

Kepada .
Yth. 1. Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan
2. Camat Muncar
di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Tanggal : 24 Februari 2014
Nomor : 2677/UN10.3/PG/2014
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada
Nama / NIM : FANDI ADITYA FIANDA / 10503010011074

Bermaksud melaksanakan Riset / Survey :

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Konservasi Wilayah
Pesisir Yang Berkelanjutan (Studi Perda No.35 tahun 2003
tentang Wilayah Konservasi kayu Aking di Kecamatan
Muncar kabupaten Banyuwangi)
Tempat : Kecamatan Muncar
Waktu : 03 Maret s/d 12 April 2014

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan
dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk
memberikan bantuan berupa tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan
ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

Kabid Bina Ideologi Pembauran,Wawasan
Kebangsaan



Drs. DR. WIDODO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19601014 199103 1 007

Tembusan :

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Fandi Aditya Fianda
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 April 1992
Alamat : Jalan Majapahit No. 26, Banyuwangi
Jenis Kelamin : Laki - Laki
E-mail : fandi1748@gmail.com
Status Perkawinan : Belum Kawin

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 1997-1998, TK Pertiwi Banyuwangi
2. 1998-2004, SDN 1 Kebalenan Banyuwangi
3. 2004-2007, SMP Negeri 2 Banyuwangi
4. 2007-2010, SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi
5. 2010-2014, Terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya